SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA
NEGERI 7 PINRANG

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

**PENGARUH KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA
NEGERI 7 PINRANG**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Disusun dan diajukan Oleh :
HILALIAH
NIM : 105641106517**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

11/09/2021

1 exp.
smb. Alumni

R / 0118 / IPM / 21 CD
HIL
P

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang

Nama : Hilaliah

NIM : 105641106517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
NIDN. 0925026002

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

Mengetahui,

Dekan

Ketua

Fisipol Unismuh Makassar

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730.727

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua **Sekretaris**

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)
(.....)

2. Hardianto Hawing, ST.,MA
(.....)

3. Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilaliah

NIM : 105641106517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa, skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik maupun sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Hilaliah
NIM : 105641106517

ABSTRAK

HILALIAH, Pengaruh Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kualitas Pendidikan di SMA 7 Pinrang. Di bimbing oleh Amir Muhiddin dan Nuryanti Mustari.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA 7 Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi *Desain concurrent triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara seimbang). Adapun jumlah populasi di penelitian ini adalah 182 peserta didik, karena populasi ada terlalu banyak dan sulit untuk dijangkau satu-satu maka di ambil beberapa sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* adapun kategorinya adalah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi pada tahun ajaran 2020/2021. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 orang dan informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Teknik Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dengan perolehan nilai koefisien penentunya sebesar 0,555 atau 55,5% sedangkan selebihnya yang tidak berpengaruh sebesar 44,5% yang di sebabkan oleh adanya kebijakan atau program lain di bidang pendidikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik di SMA Negeri 7 Pinrang memperoleh penilaian dari 65 responden sebesar 83% yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dalam PPDB sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu untuk pemeratakan pendidikan, untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, serta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sedangkan untuk kualitas pendidikan memperoleh hasil penilaian sebesar 83,1% yang menunjukkan bahwa input, proses, dan output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sudah kualitas.

Kata Kunci : Kebijakan Zonasi, dan Kualitas Pendidikan

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”

Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wata'aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan sehingga peneti bisa menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, sebagai bukti dari perjuangan yang panjang dan menjadi jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam *“Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad”* juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang mengguling tikar-tikar kejahiliaan dan membenteng tikar – tikar kemuliaan islam.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kualitas Pendidikan Di SMA Negeri 7 Pinrang”** ini adalah tugas akhir karya ilmiah yang wajib di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelas sarjana S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Arsyad dan Ibunda Hj.Hajar, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk membesarkan, mendidik dan memberi kehidupan yang layak untuk penulis. serta adik kandung Alfiyah Deviana Az-zahra yang memberi dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi penulis.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya diantaranya :

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Ahmad Harakan S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menampaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi penulis.
5. Para Dosen, dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 7 Pinrang yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di kelas IP.B serta teman-teman angkatan 2017 yang awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian akhir setia memberi dukungan kepada penulis
8. Saudara-saudariku, Mega, Nia, Sri, Akbar, dan Uskar yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Adikku Sarmila, dan Tasya yang senantiasa mendampingi di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
10. Sahabat-sahabat terbaikku, Nurdiana dan Nurafika yang selalu memberikan semangat dan supportnya selama proses penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga yang tak bisa di ucapkan satu-satu yang telah memberikan banyak motivasi untuk selalu kuat dan sabar untuk menjalani lika liku untuk menyelesaikan pendidikan S1 di universitas Muhammadiyah Makassar,dan
12. Semua keluarga, sahabat, teman-teman,dan berbagai pihak yang tidak bisa di ucapkan satu-satu yang telah membantu penulisan dengan ikhlas dalam hal berhubungan dengan penyelesaian studi penulis

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini memberi manfaat kepada para pembaca serta menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu pemerintahan ataupun berkaitan dengan judul skripsi ini. Serta bermanfaat untuk almamater kampus biru, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2020

Penulis

Hilaliah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENERIMA TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Konsep Kebijakan pendidikan.....	13
C. Kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB).....	17
E. Kerangka fikir.....	30
F. Definisi Operasional Variabel.....	32
G. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36

C. Informan Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Sumber Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
H. Pengabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	43
B. Gambaran Umum Responden.....	50
C. Uji Validitas.....	51
D. Uji Reabilitas.....	54
E. Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Penelitian Terdahulu	10
TABEL 3.1	Informan Penelitian.....	37
TABEL 3.2	Skor dalam Penelitian	39
TABEL 4.1	Sarana dan Prasarana SMA Negeri 7 Pinrang	47
TABEL 4.2	Jumlah peserta didik SMA Negeri 7 Pinrang.....	48
TABEL 4.3	Jumlah peserta didik yang diterima tahun 2020/2021	49
TABEL 4.4	Responden berdasarkan jenis kelamin	50
TABEL 4.5	Responden berdasarkan usia	51
TABEL 4.6	Uji validitas variabel X	52
TABEL 4.7	Uji validitas variabel Y	53
TABEL 4.8	Uji reabilitas variabel X	54
TABEL 4.9	Uji reabilitas variabel Y	55
TABEL 4.10	Jumlah Peserta didik yang diterima jalur zonasi	56
TABEL 4.11	Kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik.....	57
TABEL 4.12	Kebijakan zonasi memudahkan calon peserta didik diterima di sekolah.....	59
TABEL 4.13	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur nilai rapor atau nilai UN.....	60
TABEL 4.14	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur tingkat ekonomi peserta didik	61
TABEL 4.15	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah dengan sekolah.....	63
TABEL 4.16	Pemerataan akses pendidikan.....	64
TABEL 4.17	Kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan <i>non</i> favorit	67

TABEL 4.18 Kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah	68
TABEL 4.19 Kebijakan zonasi meningkatkan profesionalisme guru	69
TABEL 4.20 Kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik	71
TABEL 4.21 Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah	72
TABEL 4.22 Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit	73
TABEL 4.23 Jumlah peserta didik yang diterima sebelum adanya zonasi.....	76
TABEL 4.24 Kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan Pendidikan.....	77
TABEL 4.25 PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik.....	78
TABEL 4.26 PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik	79
TABEL 4.27 PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok.....	81
TABEL 4.28 PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi	82
TABEL 4.29 Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi	83
TABEL 4.30 Tanggapan Responden Tentang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 7 Pinrang	86
TABEL 4.31 Sekolah memiliki peserta didik yang siap mengikuti proses pembelajaran	92
TABEL 4.32 Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran	93
TABEL 4.33 Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan.....	94
TABEL 4.34 Sekolah menjalankan kurikulum pembelajaran.....	95

TABEL 4.35 Sekolah Memiliki visi dan misi	96
TABEL 4.36 Input	97
TABEL 4.37 Proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik	100
TABEL 4.38 Pada saat proses pembelajaran guru menguasai materi pembelajaran	101
TABEL 4.39 Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran	102
TABEL 4.40 Sekolah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran	103
TABEL 4.41 Sekolah menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif	104
TABEL 4.42 Proses	105
TABEL 4.43 Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik	109
TABEL 4.44 Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik	110
TABEL 4.45 Proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik	111
TABEL 4.46 Proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik	112
TABEL 4.47 Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif peserta didik	113
TABEL 4.48 Output	114
TABEL 4.49 Daftar Prestasi	117
TABEL 4.50 Tanggapan responden tentang kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang	118
TABEL 4.51 Hasil Uji T	122
TABEL 4.52 Hasil Uji F	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” artinya pendidikan merupakan hak asasi yang berhak didapatkan setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan oleh sebab itu pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang di atur dalam Undang-undang No, 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional ialah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, artinya mutu pendidikan harus merata, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, tanpa adanya diskriminasi. Sistem pendidikan nasional Indonesia diatur secara sistematis dan terencana, namun implementasi sebuah kebijakan kadang kala tidak sesuai dengan harapan dan tujuan awal kebijakan tersebut dibuat. Permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi hal yang mengkhawatirkan terutama mengenai pemerataan pendidikan, adanya “labelling

sekolah” di pendidikan Indonesia yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak-anak bangsa seluruh pelosok negeri.

Labeling sekolahn menciptakan perbedaan kualitas antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Terdapat anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit dianggap mampu memberikan layanan terbaik dan menjamin masa depan peserta didiknya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup peserta didik. Sedangkan sekolah yang tidak termasuk dalam kategori sekolah favorit seolah di anggap sekolah biasa yang tidak akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut.

Di sekolah favorit disediakan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap dalam menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional (Asri, 2019). Penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah favorit disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah yang dianggap tidak favorit kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan dan mengakibatkan mutu

layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak disetiap wilayah pelosok tanah air. Ketidakmeratanya pendidikan akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional .

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan nasional menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas (Safarah & Wibowo, 2018). Menurut (Nurlailiyah, 2019) dalam pemerataan pendidikan ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu pertama persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang artinya akses layanan pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah, kedua keadilan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu artinya tidak ada pembeda antara kualitas sekolah A dengan sekolah B.

Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Muhadjir effendi yang dilangsing pada (Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, 2018), menyatakan bahwa: Sekolah negeri memproduksi layanan publik, layanan publik harus memiliki tiga aspek, yang pertama *non-rivalry*, *no-nexcludability*, dan *non-discrimination*. Artinya tidak boleh dikompertisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga persyaratan tersebut sebagai layanan publik.

Dengan banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi maka pemerintah melakukan reformasi pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Pemerintah menjalankan sebuah kebijakan yang diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru yang di dalamnya mengatur mengenai kebijakan sistem zonasi pendidikan. Kebijakan dikenal dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris yang mengandung arti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintah (Hasbullah, 2015). Artinya kebijakan dibuat untuk mengatur atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam hal ini, kebijakan sistem zonasi dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan sehingga tercapai pendidikan nasional dapat tercapai.

Menurut (Asri, 2019) sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimana calon peserta didik yang diterima berdasarkan jarak atau radius zona antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan manajemen peserta didik. Menurut Knezevich dalam (Asri, 2019) mengartikan bahwa manajemen peserta didik (*pupil personnel administration*) sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di

sekolah. Penerimaan peserta didik baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal.

Pada tahun ajaran 2020/2021 Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di atur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, menyatakan bahwa jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) mewajibkan sekolah negeri milik pemerintah daerah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit 50%, dari daya tampung yang dibutuhkan sekolah. Kouta 50% sudah termasuk kouta bagi peserta didik menyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Peraturan ini memberi konsekuensi jangka panjang bahwa jalur zonasi akan menjadikan setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik, tidak ada lagi istilah istilah yang membuat adanya “kasta” atau “labeling” pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya. Kebijakan zonasi diharapkan mampu menghilangkan gap antar sekolah dan siswa, sehingga terciptanya pendidikan yang merata dan adil tanpa diskriminasi serta diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang memadai (Oktafiana et al., 2018).

Dengan adanya sistem zonasi, sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menjadi sekolah unggulan secara mutu karena dana BOS (bantuan operasional

sekolah) yang didapatkan sama, maka peluang baiknya juga sama. Sistem ini merupakan keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan “pendidikan untuk semua”. Sistem ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, bukan pendidikan eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi orang atau kelompok tertentu yang selama puluhan tahun dilaksanakan (Muhiddin, 2019). Diharapkan dengan diberlakukannya sistem zonasi ini, permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dapat terselesaikan.

Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Menurut Ali Imron dalam (Asri, 2019) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan pendidikan secara konkrit di lapangan. Implementasi kebijakan harus dilakukan, karena masalah-masalah yang dirumuskan dalam perumusan kebijakan menuntut pemecahan masalah melalui tindakan. Akan diketahui secara jelas melalui implementasi, apakah suatu rumusan alternatif pemecahan masalah benar-benar sesuai dengan masalahnya atau tidak, melalui implementasi juga akan diketahui apakah setelah diterapkannya alternatif pemecahan masalah akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Kebijakan sistem zonasi sudah diberlakukan di berbagai sekolah negeri di Indonesia, begitu pula sekolah sekolah yang berada di Kabupaten Pinrang.

Pada dasarnya pengimplementasian kebijakan pemerintah tentang penerapan jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru adalah program yang tergolong bagus karena pemerintah menginginkan adanya pemerataan

pendidikan, namun di kembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pengguna kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, (2018) yang membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Indonesia, dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak yang diterima oleh peserta didik baru melalui sistem zonasi ini, salah satu dampaknya ialah menyebabkan anak yang memiliki prestasi maupun nilai rapor yang tinggi tidak dapat bersekolah di sekolah yang mereka inginkan dikarenakan jarak tempuh rumah mereka yang jauh dari sekolah tersebut. Hal ini menyebabkan semangat belajar anak menurun hal karena mereka memasuki sekolah yang bukan tujuan mereka (Oktafiana et al., 2018).

Dilansir dari sahabatnews.net, yang menyatakan bahwa sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Pinrang mengeluhkan kebijakan zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 tingkat SMA negeri. Orang tua siswa menganggap sistem zonasi ini merugikan calon peserta didik, terutama anak yang memiliki nilai ujian nasional (UN) yang tinggi “keadaan ini membuat kami para orang tua dan siswa resah, anak saya ikut bingung dan takut tidak mendapatkan sekolah” ungkap Ratna.

Menurut Idrus dalam diskusi bersama Ketua Ikatan Guru Indoneisa (IGI) Sulawesi Selatan, mengenai zonasi pendidikan di Kabupaten Pinrang yang dilansir dari TribunPinrang.com menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit itu tidak terlahir begitu saja, namun

ada fakta yang disaksikan oleh masyarakat di depan mata, bahwa kualitas sekolah itu memang tampak berbeda dan tak merata. Hal itulah yang memaksa sejumlah orang tua rela berbondong-bondong dan berdesak-desakan hanya untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang di anggap favorit, ungkap Idrus.

Penerapan zonasi, baru akan jauh dari masalah jika kualitas pendidikan merata, baik dari fasilitas, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sejenisnya idrus menambahkan bahwa, kebijakan zonasi tetap saja perlu diapresiasi, karena dalih penerapannya adalah pemerataan kualitas pendidikan namun, perlu pula dipertanyakan, seberapa siapkan sekolah dalam menerapkan kebijakan zonasi, apakah kebijakan ini mampu menciptakan kualitas terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **“Pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang ?
2. Bagaimana kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang ?
3. Apakah kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang.
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pendidikan, ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam ruang lingkup yang diwujudkan melalui kebijakan zonasi untuk peningkatan kualitas pendidikan .
- b. Memberikan konsep baru yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi pendidikan.
- b. Dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan gerakan perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Wayan Paramatha, Ni Putu Suwardani, & Ni Luh Suryaningsih, (2019)	Pengaruh sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap prestasi belajar pendidikan Agama siswi SMP Negeri 1 kota Denpasar tahun ajaran 2018/2019	Adapun hasil uji analisis statistik penelitian dari Paramatha, Suwardani, & Suryaningsih, (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Denpasar menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara

			<p>PPDB sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Kota Denpasar, semakin tidak baik pelaksanaan PPDB maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin tidak baik pula, begitu pula sebaliknya.</p>
2.	<p>Desi Wulandari, Adelina Hasyim, Yunisca Nurhalisa (2018)</p>	<p>Pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa</p>	<p>Hasil penelitian dari Wulandari, Hasyim, & Nurhalisa (2018) melalui uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dengan keeratan tinggi antara PPDB melalui jalur zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu</p>

			lampung Timur tahun ajaran 2017/2018..
3	Muhammad Riefqi Mubarak, 2019	Pengaruh sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI SMA Negeri 5 kota Tegal tahun ajaran 2019/2020	Hasil penelitian Mubarak (2019) melalui uji statistik menunjukkan bahwaterdapat pengaruh negatif yang signifikan pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap motivasi belajar peserta didik kelas XI SMA Negeri 5 kota Tegal tahun ajaran 2019/2020.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui bahwa persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, masing-masing peneliti membahas mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, ketiga penelitian terdahulu di atas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian campuran atau *mix metod*.

B. Konsep Kebijakan pendidikan

1. Definisi kebijakan

Kebijakan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *policy*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta menjadi tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk mencapai sasaran. Hough sebagaimana dikutip dalam (Purba.et.al.2021) mendefinisikan kebijakan merujuk pada seperangkat tujuan, rencana, usulan, program-program, atau keputusan-keputusan yang menghadirkan pengaruh dalam penyelesaian sebuah masalah.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip dalam (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana dalam tindakan tersebut terdapat hambatan dan kesempatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Wahab dalam (Arwildayanto & Sumar, 2018) mendefinisikan kebijakan sebagai bagian dari perencanaan yang dilakukan oleh sejumlah aktor terdiri dari pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu.

Menurut (Abidin, 2006) kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, kebijakan merupakan hasil keputusan yang resmi dan tertulis, kebijakan bisa berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, keputusan bupati, dan keputusan lainnya. Koontz

dan Donnell dalam (Arwildayanto & Sumar, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pernyataan atau informasi umum yang berisi pedoman dan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan mengikat yang memiliki esensi pada batasan tertentu.

Menurut (Syafaruddin, 2008) kebijakan disebut *policy* berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan merupakan pola pikir berasal dari lembaga/pemerintah yang diwujudkan dalam tataran melahirkan ide dan gagasan, yang bertujuan untuk mengatur segala kehidupan dalam lembaga tersebut melalui rumusan-rumusan aturan dan perundang-undangan yang dapat diterima dan digunakan oleh khalayak umum sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat.

Berdasarkan teori yang telah di kemukakan oleh pakar ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep yang menjadi pedoman dan batasan dalam pengambilan keputusan. Istilah kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, swasta, organisasi, maupun individu. Kebijakan berbeda dengan hukum, jika hukum dapat memaksa atau melarang sebuah tindakan, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman dari tindakan tersebut sehingga memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Definisi kebijakan pendidikan

Istilah kebijakan pendidikan sering diterjemahan sebagai *education policy*, kebijakan dapat di artikan sebagai seperangkat aturan sedangkan

pendidikan merujuk pada bidangnya, jadi kebijakan pendidikan adalah seperangkat peraturan pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut (Tilaar & Nugroho, 2008) kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan dalam rangka terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Menurut (Rohman, 2012) kebijakan pendidikan merupakan sebuah pedoman atau batasan dalam bidang pendidikan, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik. Menurut (Nugroho, 2008) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Secara umum dalam konteks kebijakan publik kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan pembangunan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yang mencakup didalamnya tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan pendidikan berupa rumusan langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman atau batasan di bidang pendidikan yang biasa dijabarkan melalui visi dan misi pendidikan, dalam rangka terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dalam ini adalah kebijakan dalam bidang pendidikan, setiap kebijakan memiliki karakteristik. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan menurut Imron yang dikutip dalam (Madjid, 2018) meliputi :

a. Memiliki tujuan

Karakteristik yang paling penting dan menonjol dari munculnya kebijakan pendidikan yaitu harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah

b. Memiliki aspek legal-formal

Berlakunya kebijakan pendidikan tentu harus mendapatkan pengakuan dari wilayah jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga harus adanya pemenuhan atas pra-syarat yang dilalui terlebih dahulu. Sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan suatu paduan yang bersifat umum, maka kebijakan tersebut harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan, serta memiliki tujuan yang jelas sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Perumusan kebijakan pendidikan juga dibuat oleh para ahli di bidang tersebut, agar tidak menimbulkan masalah baik itu masalah di bidang pendidikan ataupun di luar bidang pendidikan. Adapun pembuat kebijakan adalah para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan

para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan, merekalah unsur minimal dalam pembuatan kebijakan pendidikan.

e. Dapat di evaluasi

Kebijakan pendidikan biasanya tidak akan luput dari kesalahan maupun kekeliruan, jadi apabila kebijakan yang diterapkan sudah di anggap baik maka perlu di adanya pengembangan, sebaliknya jika kebijakan yang diterapkan memiliki kesalahan, maka perlu adanya perbaikan, sehingga kebijakan pendidikan tersebut dapat di evaluasi melalui perbaikan dengan mudah dan efektif.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan harus sistematis agar kebijakan tersebut tidak bersifat pragmatis, diskriminasi dan memiliki struktur yang rapuh akibat adanya serangkaian faktor yang hilang atau berbenturan dengan yang tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal.

C. Kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan manajemen peserta didik. Menurut Knezevich yang dikutip dalam (Asri, 2019) mengartikan manajemen peserta didik (*pupil personnel administration*) sebagai kegiatan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan dan minat peserta didik. Penerimaan peserta didik baru merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik yang sangat penting. Penerimaan peserta didik baru akan membawa dampak positif untuk sekolah karena dengan adanya penerimaan peserta didik baru kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini bidang pendidikan menerapkan sebuah kebijakan dalam proses PPDB, kebijakan ini disebut kebijakan sistem zonasi. Secara keseluruhan kebijakan sistem zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Sistem zonasi merupakan sistem PPDB dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Setiap sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase minimal 50% dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia (Suminar, 2019).

Pada tahun ajaran 2018/2019 kebijakan zonasi diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018, sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA sederajat yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang

perubahan atas Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Kemudian diperbaharui kembali dan disahkan pada tanggal 10 Desember 2019 oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim menjadi Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Tahun ajaran 2020/2021 Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di atur dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dimana dijelaskan bahwa :

1. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan daya tampung yang disediakan paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Kوتا jalur zonasi sudah termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
3. Domisi yang dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru.
4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik

yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

5. Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
6. Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Kebijakan zonasi menerima peserta didik berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah, calon peserta didik yang rumahnya di dalam wilayah zonasi dia berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah tersebut. Daya tampung jalur zonasi setiap sekolah minimal 50% dari jumlah calon peserta didik yang akan diterima dan penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan menggunakan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan lingkungan sekolah.

Menurut (Asri,2019) sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan sistem penerimaan peserta didik dimana calon peserta didik yang diterima berdasarkan jarak atau radius zona antara sekolah dengan rumah peserta didik. Dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan zonasi di terapkan pada tahun 2017 yang diawali dengan terbitnya Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK, SD, SMA atau bentuk lain yang sederajat.

Menurut (Andawiyah, 2021) kebijakan zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan penentuan radius zona yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan diterima. Peraturan tersebut ditujukan pada jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA pada satuan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pemerintah.

(Seminar, 2019) dalam bukunya “zonasi pendidikan” menjelaskan bahwa sistem zonasi merupakan jalur di dalam PPDB yang bertujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Sistem zonasi ini mempersiapkan seluruh generasi bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang layak demi adanya perubahan positif jangka panjang bagi bangsa dan negara.

Dengan menghilangkan predikat sekolah unggul, otomatis peserta didik yang memiliki berprestasi tinggi tidak hanya akan berkumpul di sekolah tertentu, sehingga sekolah yang tidak di anggap tidak favorit juga akan mendapatkan input siswa yang berprestasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi merupakan upaya dalam mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah atau sekolah tertentu.

Menurut (PDSPK Kemendikbud, 2018) sistem zonasi disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu sehingga anak-anak terbaik tidak perlu

mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Adapun tujuan sistem zonasi berdasarkan buku panduan sistem zonasi (PDSPK Kemendikbud, 2018) antara lain ;

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Tujuan sistem zonasi juga untuk menghilangkan kastanisasi sekolah, dimana tidak ada lagi image sekolah yang baik dan buruk. Semua sekolah disamaratakan, tidak ada sekolah favorit dan *non* favorit juga tidak ada sekolah yang dispesialkan Dalam perbaikan di bidang pendidikan kebijakan zonasi akan menciptakan pemerataan akses dan mutu pendidikan (Syafitri, 2019). Dengan

adanya sistem zonasi lokasi sekolah lebih dekat dengan rumah peserta didik sehingga akan membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk menciptakan banyak sekolah favorit kebijakan zonasi diharapkan menjadi pembentuk bibit unggul yang mampu menjadikan semua sekolah berkualitas.

Tujuan kebijakan zonasi menurut (Suminar, 2019) yaitu untuk pemerataan akses pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Sistem zonasi bertujuan untuk memberikan pemerataan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di area tersebut terdaftar di sekolah, sehingga hal tersebut memudahkan masyarakat memperoleh layanan pendidikan. Kebijakan zonasi bertujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit dan menjadikan semua sekolah negeri menjadi sekolah yang berkualitas sehingga tercipta pemerataan kualitas pendidikan diseluruh sekolah negeri yang ada di Indonesia. Kebijakan zonasi memberikan akses lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik karena kebijakan zonasi tidak mengukur latar belakang kemampuan atau perbedaan status sosial ekonomi peserta didik. Pada dasarnya semua anak bangsa memiliki hak yang sama, karena itu tidak boleh ada diskriminasi dan hak eksklusif untuk mendapatkan layanan pendidikan (Suminar, 2019).

Sebelum pemerintah menetapkan kebijakan zonasi di Indonesia, terlebih dahulu ada beberapa negara di dunia yang menjalankan kebijakan ini seperti

Inggris, Amerika, Estonia Finlandia, Australia dan Jepang . Meski memiliki kebijakan yang sama mengenai Sistem *Zoning* atau lebih dikenal dengan sekolah sistem zonasi, tapi masing-masing negara memiliki kriteria khusus dalam pelaksanaannya akan tetapi tujuan kebijakan zonasi ini tetap sama yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah akses menuju sekolah dan lain sebagainya.

Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terdapat sanksi apabila terjadi pemalsuan kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana, bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

D. Konsep Kualitas Pendidikan

1. Definisi kualitas pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu barang. Solmon dalam tulisannya yang berjudul *The Quality of Education* menyatakan bahwa untuk memahami kualitas pendidikan diperlukan pertimbangan tentang bagaimana kualitas itu diukur. Menurut (Suharsaputra, 2010) terdapat beberapa sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, antara lain:

- a. Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil
- b. Pandangan yang melihat pada proses
- c. Pendekatan yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau pada penerima manfaat pendidikan lainnya yang diberikan oleh institusi dan atau program pendidikan pendidikan

Menurut (Jeremo, 2005) Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan, input, proses, dan output saling pendidikan, agar proses yang baik tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil (out put) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya (Rusman, 2009).

Kualitas merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang ditetapkan. Dalam pendidikan kualitas mencakup input, proses, dan output pendidikan, semakin tinggi tingkat kesiapan input maka semakin berkualitas input pendidikan tersebut, bila input sekolah (pendidik, peserta didik, kurikulum, uang, peralatan) dilakukan secara harmonis dan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif maka proses sekolah dikatakan memiliki kualitas yang tinggi sehingga output sekolah khususnya peserta didik mencapai nilai akademik dan non akademik yang tinggi (Alfiningsi,2018).

(Hanifah dan Suhana, 2012) menyatakan bahwa indikator kualitas pendidikan pendidikan adalah mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu untuk

berlangsungnya proses pendidikan. Adapun input pendidikan menurut (Hanifah dan Suhana, 2012) antara lain :

- a. Input sumber daya, meliputi sumber daya manusia (guru dan siswa) dan sumber daya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang dan bahan)
- a. Input perangkat lunak, meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program.
- b. Input harapan-harapan, berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik, oleh karena itu tinggi rendahnya suatu input dapat diukur dari tingkat kesiapan. Kemudian Proses dapat dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu menciptakan motivasi dan minat belajar peserta didik serta benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Evaluasi pun harus menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak boleh ditinggal sampai akhir studi. Hasilnya harus dibicarakan dengan murid dengan tujuan untuk melengkapi hasil evaluasi. Sifat melibatkan seluruh elemen akan sangat membantu dalam membangun kecakapan analitis para pelajar. Selanjutnya kualitas dalam konteks output pendidikan adalah mengacu pada prestasi yang dicapai oleh anak didik atau sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, (misalnya

ukangan umum, UAS, EBTA dan UNAS). Dapat pula prestasi dibidang lain, seperti prestasi disuatu cabang olahraga, seni atau ketrampilan tambahan tertentu (Hanifah dan Suhana, 2012).

Adapun jika dilihat dari sudut pandang korelasi mutu dengan pendidikan, mutu dapat diartikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad dalam (Sunarti, 2011) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Dengan demikian pengertian kualitas pendidikan bersifat dinamis yang artinya dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pengertian kualitas pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya baik pelanggan internal seperti kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan atau pelanggan eksternal yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, kualitas dalam konteks pendidikan menurut penulis mengacu pada input, proses dan output atau hasil prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, maka dapat disimpulkan kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

2. Faktor-faktor utama peningkatan mutu pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan (Danim, 2007) menyarankan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu :

a. Kepemimpinan kepala sekolah

Yang mana kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.

b. Guru

Perlibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.

c. Siswa

Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

d. Kurikulum

Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.

e. Jaringan kerjasama

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

3. Standar mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu atau kualitas pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- f. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, p/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar Nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4).

E. Kerangka fikir

Penelitian ini menganalisis variabel pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan mahasiswa baru (PPDB) terhadap variabel kualitas pendidikan. Variabel kebijakan zonasi dalam penerimaan mahasiswa baru (PPDB) akan di analisis menggunakan teori yang bersumber dari (Suminar, 2019) dengan indikator sebagai berikut : pemerataan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi. Kemudian dalam menganalisis variabel kualitas pendidikan akan menggunakan teori indikator mutu/kualitas pendidikan dari (Hanifah dan Suhana, 2012) dengan indikator sebagai berikut: input, proses, dan output. Berdasarkan uraian di atas

maka dapat digambarkan dalam paradigma pemikiran seperti pada gambar 2.2

sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka pikir

F. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau biasa disebut variabel yang mempengaruhi, adalah variabel yang menyebabkan perubahan terhadap variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*). Variable bebas pada penelitian ini adalah Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), adapun indikatornya antara lain :

a. Pemerataan akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar seluruh masyarakat mudah mengakses layanan pendidikan. Kejakan zonasi pada PPDB memudahkan anak usia sekolah diterima di sebuah lembaga pendidikan. Hal tersebut di sebabkan karena PPDB jalur zonasi mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisi terdekat dengan zona sekolah, dan tidak menerapkan sistem penerimaan berdasarkan kemampuan akademik ataupun status sosial ekonomi peserta didik sehingga semua anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan dengan mudah.

b. Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit

Merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu, dengan menghilangkan anggapan di tengah masyarakat

mengenai sekolah favorit dan tidak favorit, maka setiap sekolah akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh input siswa yang unggul, kualitas sarana dan prasarana yang berkualitas serta guru yang kompeten maka pendidikan yang berkualitas akan merata.

c. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi

Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik dan perbedaan status sosial ekonomi karena itu, tidak boleh ada diskriminasi atau hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi orang atau kelompok tertentu.

2. Variabel terikat (*Dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau *independent variable*, Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas pendidikan, indikatornya sebagai berikut:

a. Input

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang memiliki peran dalam proses pendidikan, input pendidikan berupa para pelaku pendidikan seperti guru dan siswa, peralatan atau sarana dan prasarana, kurikulum serta visi dan misi sekolah. Dalam proses pendidikan guru-guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional, sekolah harus memiliki peserta didik yang siap belajar, kurikulum yang digunakan harus sesuai kebutuhan peserta didik, serta memiliki fasilitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran..

b. Proses

Kelancaran proses pendidikan di ukur dari bagaimana peran input pendidikan. Proses pendidikan dikatakan lancar apabila input sekolah (guru, siswa, kurikulum, dan peralatan) mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*) dan mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik.

c. Output

Output atau hasil pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila peserta didik menghasilkan prestasi di bidang akademik maupun *non* akademik, output pendidikan berkualitas juga bisa dilihat dari proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dapat membentuk karakter menjadi lebih baik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mendorong kreativitas peserta didik.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau suatu pendapat dan kesimpulan yang belum final, yang harus diuji dahulu kebenarannya. Dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang. Merujuk pada pengertian hipotesis diatas maka, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 06 April 2021 s/d 6 Juni 2021. Lokasi penelitian ini di SMA 7 Pinrang. Salah satu yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah SMAN 7 Pinrang ini salah satu sekolah di Kabupaten Pinrang yang menjalankan kebijakan zonasi dalam penerimaan pesesta didik baru (PPDB).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi Desain *concurrent triangulation* (Metode campuran kuantitatif dan kualitatif secara seimbang). Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survei yang merupakan tipe penelitian yang informasinya dikumpulkan dari hasil pembagian kuesioner kepada sampel penelitian.

C. Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan didasarkan pada tujuan dan pertimbangan serta kriteria yang ditetapkan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, bukan berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah. Berikut informan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Dra. Hj. ST. Nur Aeni, M.Pd	SNA	Wakil Kepala Sekolah	1 orang
2	Hj. Haisah. S.Pd	HH	Kepala Tata Usaha	1 orang
3	Muhammad Ali Anwar, S.Pd	MMA	Ketua PPDB	1 orang
4	Muh. Fitrah, S.Pd	FTR	Sekretaris PPDB	1 orang
			Total	4 orang

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 SMA Negeri 7 Pinrang berjumlah 182 orang karena jumlah populasi melebihi 100 orang maka peneliti memutuskan memilih beberapa orang untuk dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian terkecil atau salah satu objek bagian dari populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Probability Sampling*. Cara ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, maka dalam penelitian ini sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang dalam populasi tersebut.

Untuk menyederhanakan jumlah sampel yang akan diteliti, maka digunakan rumus slovin. Rumus Slovin digunakan karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut :

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Sehingga jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin dengan error tolerance 10% (0,1) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{182}{1+182(0,1)^2} = \frac{182}{2,82} \end{aligned}$$

$$n = 65$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat dihasilkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 65 peserta didik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu pemusatan perhatian terhadap suatu obyek yang diteliti.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang menyangkut fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi tertutup (*non participant observation*) dengan tidak terlibat langsung dengan aktifitas responden. Peneliti melakukan observasi terhadap

indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (Variabel X) dan kualitas pendidikan (Variabel Y).

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini kuesioner dibagikan kepada peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi pada tahun ajaran 2020/2021 SMA negeri 7 Pinrang. kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang dilengkapi dengan skala pengukuran yaitu kuesioner yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda dengan pilihan jawaban yang sudah ada, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan yaitu :

Tabel 3.2
Skor dalam penelitian

Simbol	Pernyataan	Skor
SS	Sangat setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang setuju	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat tidak setuju	1

3. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terbuka untuk memperoleh informasi dari informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu melakukan perencanaan dan persiapan sehingga

pada saat wawancara berlangsung peneliti tidak kaku dalam mengajukan pertanyaan. Peneliti mempersiapkan alat wawancara berupa pedoman wawancara, buku catatan, tape recorder dan kamera handphone.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari referensi-referensi dari buku, jurnal, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

F. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari responden yang berupa jawaban pertanyaan dari kuesioner yang disebarkan dan dari hasil wawancara informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini antara lain buku, dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Teknik analisis regresi berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel X dan Y. Model persamaan regresi sederhana adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

X = Variabel independent

a = Intercept atau konstanta

b = Adalah koefisien regresi atau slope

e = Residual atau error

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *Software SPSS version 25*. Hasil analisis dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika nilai P value (Sig) $\geq 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Jika nilai P value (Sig) $\leq 0,05$, maka H_o diterima dan H_a ditolak.

H. Pengabsahan Data

Untuk mengukur data, ada dua konsep yang digunakan yaitu validitas dan reliabilitas. Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias ajika datanya kurang valid dan tidak reliabel.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Penghitungan uji validitas menggunakan bantuan SPSS pada komputer. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item total correlations) dengan nilai r tabel. Jika r hitung $>$ dari r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Sugiono, 2014).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten/stabil dari waktu ke (Sugiono, 2014). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai cronbach alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) $> 0,6$ yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya jika cronbach alpha (α) $< 0,6$ maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 7 Pinrang

Seiring dengan perspektif masyarakat mengenai pentingnya sebuah pendidikan, maka pada tahun 90an masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Mattiro Bulu sangat mendambakan sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Namun pada saat itu fasilitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah atas masih sangat minim tetapi masyarakat terus berusaha sekuat tenaga agar ada SMA di lingkungan Kecamatan Mattiro Bulu. Pada akhirnya di penghujung tahun 90-an beberapa tokoh masyarakat yakni : Hj. Andi Colli, H. Andi Tabu, Andi Baddu, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sekolah di Kecamatan Mattiro Bulu. Tepatnya di Kampung Baka Lapalopo Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu.

Hj. Andi Colli bersama beberapa masyarakat memberikan lahannya untuk pembangunan sekolah. Di antara pemilik lahan tersebut ada yang menghibakan secara ikhlas dan ada pula yang menjualnya dengan harga terjangkau dengan harapan pembangunan sekolah di lingkungan mereka dapat mewujudkan pendidikan yang layak bagi anak cucu mereka. Alhasil Pada tahun 1998 masyarakat Mattiro Bulu telah resmi memiliki sekolah yang berada pada wilayah mereka. Sekolah ini resmi dengan nama SMU Negeri Pinrang berlokasi di Kampung Baka, Kecamatan Mattiro Bulu, namun pada

saat itu masyarakat lebih mengenal dengan sebutan SMA Baka. Beberapa pejabat pada saat itu diantaranya:

- a. Ir. Arifin Thalib (Ka. Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan)
- b. Drs. H. Andi Nawir Pairing MP (bupati Pinrang)
- c. Drs. H. Suri Putra Nurdin Budi M.pd (Ka Kandepdikbud Kab. Pinrang)
- d. Andi Paweddai (Lurah Manarang)

Nama sekolah ini beberapa kali mengalami perubahan :

- a. SMA Negeri Pinrang SMU (1998-1999)
- b. SMA Negeri 1 Mattiro Bulu (1999/2002)
- c. SMA Negeri 1 Mattiro Bulu(2002/2014)
- d. SMAN 7 Mattiro Bulu (2014-Sekarang)

Pada awalnya sekolah ini masih berfiliasi SMA Negeri Pinrang. Kemudian dengan surat penugasan KA KANWIL Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 mei 1999 menugaskan Drs. H. Amiruddin Nonci sebagai Pelaksana Harian Kepala SMU Negeri 1 Mattiro Bulu. Selanjutnya, beliau diangkat menjadi kepala SMU Negeri 1 Mattiro Bulu depenetif pda tahun 2000 bertepatan dengan peresmian sekolah ini yakni dengan surat keputusan Mentri Depdikbud RI Nomor 001A/O/1999 tanggal 5 januari 1999 tentang pembukaan dan penergian sekolah di indonesia tahun pelajaran 1997/1998 dengan nama SMU Negeri 1 Mattiro Bulu. Inilah yang menjadi hari lahirnya SMA Negeri 7 Pinrang.

Daftar nama kepala SMA Negeri 7 Pinrang

- a. Drs. H. Amiruddin Nonci, M.pd.(1999-2002)
- b. Drs. Syarifuddin Caco (2005-2007)
- c. Drs . H. Mahmud Bandu M.pd.(2007-2012)
- d. Drs. Muhammad Ilyas, M.Si.(2012-2013)
- e. Drs. Hamzah Rente (2013-2017)
- f. Drs. Iqwan Matu M.pd (2017-sekarang)

Daftar nama ketua komite SMA Negeri 7 Pinrang:

- a. Drs. Muhammad Yusuf Haba (1998-2000)
- b. Drs. Wahid Katarru (2000-2006).
- c. H. Jamaluddin Idris, BA.(2006-sekarang).

2. Identitas Sekolah

Nama sekolah	: SMAN 7 Pinrang
NPSN	: 40314430
Alamat Sekolah	: Poros Pare Pinrang KM 8, Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
Status	: Negeri
SK Pendirian	: 001 a/0/1999
Tanggal SK Pendirian	: 1999/01/01
SK Izin Operasional	: 0014/0/1999
Tanggal SK Izin Operasional	: 1999-01-05
Akreditasi	: B / 82
Luas Tanas	: 3 M ²
Daya Listrik	: 3,900
Akses Internet	: Telkomsel Flash

Email : Sman7Pinrang@gmail.com

Webside : sman7Pinrang.sch.id

Kepala Sekolah :

Nama : Drs. Ikhwan Matu, M.Pd

NIP : 19761231 199602 1 002

Ketua Komite :

Nama : H. Jamaluddin Idria, BA

Tahun SK : 2006

3. Visi dan Misi SMA Negeri 7 Pinrang

a. Visi

Adapun Visi dari SMA Negeri 7 Pinrang adalah :

*Terdepan Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Disiplin,
Berakarakter, Beriman, Bertakwa Serta Berwawasan Lingkungan*

b. Misi

Adapun Misi dari SMA Negeri 7 Pinrang adalah :

- 1) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berlandaskan iman dan takwa
- 2) Mencetak sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif, aspiratif yang berbingkai nilai-nilai kehidupan.
- 3) Meningkatkan disiplin kerja yang tinggi untuk mencapai hasil yang berkualitas
- 4) Menciptakan suasana kerja yang penuh dedikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ideal
- 5) Menciptakan suasana kondusif, kekeluargaan dan rasa memiliki yang tinggi.

6) Meningkatkan prestasi olahragadan seni secara optimal

7) Menata lingkungan sekolah yang sehat, bersih, tertib dan aman secara berkesinambungan

4. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana di SMA 7 Pinrang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 7 Pinrang

No	Sarana	Jumlah	Keadaan
1	Ruangan Guru	1	Baik
2	Ruangan Kelas	22	Baik
3	Ruangan Kepala Sekolah	1	Baik
4	Ruangan Tata Usaha	1	Baik
5	Laboratorium Komputer	1	Baik
6	Ruangan Sanggar Seni	1	Baik
7	Perpustakaan	1	Sementara Renovasi
8	Ruangan IKA (Alumni)	1	Baik
9	Aula	1	Baik
10	WC	4	Baik
11	Lapangan Basket	1	Baik
12	Parkiran	2	Baik
13	Laboratorium Fisika	1	Baik
14	Laboratorium Kimia	1	Baik
15	Pondok andalan/Gasebo	1	Baik
16	Tribun	1	Baik

17	Ruangan Konseling	1	Baik
18	Ruangan UKS	1	Baik
19	Sekretariat Organisasi	4	Baik
20	Ruangan Multimedia	1	Baik
21	Mushalla	1	Sementara Renovasi

Sumber : Data Sekunder, SMA Negeri 7 Pinrang, 2021

5. Jumlah Peserta didik SMA Negeri 7 Pinrang

Seiring dengan berkembangnya SMA 7 Pinrang, pada tahun 2020/2021 jumlah rombongan belajar sebanyak 21 rombel. Terdiri dari 2 Jurusan yaitu Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) 8 rombel dan Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (MIPA) 13 rombel. Dari rombel tersebut terdiri dari rombel kelas X, XI, dan XII. Berikut tabel data peserta didik di SMA Negeri 7 Pinrang sebagai berikut

Tabel 4.2

Jumlah didik di SMA Negeri 7 Pinrang

No.	Kelas	Peserta didik		Jumlah
		P	L	
1	X MIPA 1	26	10	36
2	X MIPA 2	27	9	36
3	X MIPA 3	24	12	36
4	X MIPA 4	29	7	36
5	X IPS 1	21	15	36
6	X IPS 2	17	19	36
7	X IPS 3	17	19	36
8	XI MIPA 1	21	13	34
9	XI MIPA 2	27	9	36
10	XI MIPA 3	26	10	36

11	XI MIPA 4	21	13	34
12	XI MIPA 5	26	10	36
13	XI IPS 1	15	11	26
14	XI IPS 2	13	17	30
15	XI IPS 3	17	14	31
16	XII MIPA 1	22	11	33
17	XII MIPA 2	22	11	33
18	XII MIPA 3	21	12	33
19	XII MIPA 4	20	12	32
20	XII IPS 1	13	13	26
21	XII IPS 2	16	14	30
Jumlah Peserta didik				702

Sumber : Data Sekunder SMA Negeri 7 Pinrang, 2020

6. Jumlah Peserta didik yang diterima pada tahun ajaran 2020/2021 SMA Negeri 7 Pinrang

Terdapat 3 jalur dalam Penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua, Adapun jumlah peserta didik yang diterima dari masing-masing yaitu :

Tabel 4.3
Jumlah Peserta didik yang diterima
Tahun ajaran 2020/2021

No.	Jalur PPDB	Jumlah peserta didik
1	Jalur zonasi	182
2	Jalur akademik	59
3	Jalur non akademik	9
4	Jalur perpindahan tugas orang tua	2
Total		252

Sumber : Data Sekunder, SMA Negeri 7 Pinrang, 2021

B. Gambaran Umum Responden

Penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi selaku responden pada penelitian ini. Pembagian kuesioner dibagikan ke 65 Peserta didik serta melakukan wawancara kepada wakil kepala sekolah, ketua panitia PPDB, dan sekretaris PPDB.

1. Jenis Kelamin

Responden pada penelitian ini merupakan peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi, selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki laki	18	27,7
Perempuan	47	72,3
Total	65	100

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dari 65 responden, jenis kelamin perempuan merupakan jumlah responden terbanyak dengan jumlah 47 responden dengan persentase 72,3% sedangkan responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 20 orang atau 27,7% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan mendominasi dengan selisih jumlah laki-laki dan perempuan berkisar 44,6%.

2. Usia

Peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi adalah mereka yang berada pada usia siap sekolah, Usia dari Responden penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
14 Tahun	1	1,5
15 Tahun	36	55,4
16 Tahun	21	32,3
17 Tahun	6	9,3
18 Tahun	1	1,5
Total	65	100

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat masing masing 1 orang dengan persentase 1,5% berusia 14 dan 18 tahun, 36 responden persentase 55,4% berusia 15 tahun, 21 responden persentase 32,3% berusia 16 tahun, serta 6 orang dengan persentase 9,3% berusia 17 tahun, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori usia 15 tahun merupakan kategori terbanyak dari peserta didik selaku responden pada penelitian ini.

C. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan *software SPSS version 25* dengan responden sebanyak 65 orang, pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikan 5% atau 0,05 maka ditolak dan disimpulkan bahwa skor butir berkorelasi positif dengan skor

faktor sehingga dikatakan valid. r tabel untuk 0,05 pada responden 65 adalah 0,1689. Berikut adalah uji validitas variabel X (Kebijakan zonasi) dan variabel Y (Kualitas pendidikan).

1. Uji validitas variabel kebijakan zonasi (X)

Instrumen angket kebijakan zonasi dengan jumlah 15 item pertanyaan telah di uji validitas, kemudian dihitung dengan menggunakan *SPSS version*

25. Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel X

No	Variabel Kebijakan zonasi (X)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X1	0.565	0.244	Vaild
2	X2	0.671	0.244	Vaild
3	X3	0.651	0.244	Vaild
4	X4	0.574	0.244	Vaild
5	X5	0.598	0.244	Vaild
6	X6	0.519	0.244	Vaild
7	X7	0.592	0.244	Vaild
8	X8	0.650	0.244	Vaild
9	X9	0.729	0.244	Vaild
10	X10	0.660	0.244	Vaild
11	X11	0.734	0.244	Vaild
12	X12	0.616	0.244	Vaild
13	X13	0.652	0.244	Vaild
14	X14	0.608	0.244	Vaild
15	X15	0.654	0.244	Vaild

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel X (Kebijakan zonasi) diketahui bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS version* 25 diperoleh dari 15 item instrumen angket kebijakan zonasi memiliki r hitung 0.519-0.734

sedangkan untuk r_{tabel} adalah 0.244. Berdasarkan data tersebut maka terdapat 15 atau semua item pertanyaan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Validitas variabel kualitas pendidikan (Y)

Instrumen angket kualitas pendidikan dengan jumlah 15 item pertanyaan telah di uji validitas, kemudian dihitung dengan menggunakan *SPSS version 25*. Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Y

No	Variabel Kualitas pendidikan (Y)	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Y1	0.748	0.244	Vaild
2	Y2	0.688	0.244	Vaild
3	Y3	0.714	0.244	Vaild
4	Y4	0.750	0.244	Vaild
5	Y5	0.697	0.244	Vaild
6	Y6	0.718	0.244	Vaild
7	Y7	0.723	0.244	Vaild
8	Y8	0.768	0.244	Vaild
9	Y9	0.648	0.244	Vaild
10	Y10	0.660	0.244	Vaild
11	Y11	0.476	0.244	Vaild
12	Y12	0.510	0.244	Vaild
13	Y13	0.712	0.244	Vaild
14	Y14	0.506	0.244	Vaild
15	Y15	0.635	0.244	Vaild

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Y (kualitas pendidikan) diketahui bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS version 25* diperoleh dari 15 item instrumen angket memiliki r_{hitung} 0.476-0.768.

sedangkan untuk r_{tabel} adalah 0.244. Berdasarkan data tersebut maka terdapat 15 atau semua item pertanyaan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

D. Uji Reabilitas

Uji reabilitas relasi kuasa terhadap 30 item pertanyaan yang telah dinyatakan valid. pengujian reabilitas cukup dengan membandingkan jika nilai *cronbach alpha* (α) lebih dari 0,6 maka instrument tersebut *riable*, semakin besar nilainya maka berarti *intrument* tersebut semakin *riable*.

1. Uji Reabilitas Variabel kebijakan zonasi (X)

Instrumen angket kebijakan zonasi dengan jumlah 15 item pertanyaan telah diuji validitas, kemudian dihitung dengan menggunakan *SPSS version* 25. Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Reabilitas Variabel X

Reliability Statistics		Keterangan
Cronbach's Alpha	Items pertanyaan	
0,895	15	Reabel

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui *cronbach alpha* (α) variabel X (kebijakan zonasi) 0,895 dengan 15 item pertanyaan, hal tersebut menunjukkan bahwa uji raebilitas variabel X (kebijakan zonasi) dinyatakan reabel karna nilai *cronbach alpha* (α) lebih dari 0,6.

2. Uji Reabilitas Variabel kualitas pendidikan (Y)

Instrumen kualitas pendidikan dengan jumlah 15 item pertanyaan telah diuji validitas, kemudian dihitung dengan menggunakan *SPSS verssion* 25.

Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics		Keterangan
Cronbach's Alpha	Items pertanyaan	
0,904	15	Reabel

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui *cronbach alpha (a)* variabel Y (kualitas pendidikan) 0.904 dengan 15 item pertanyaan, hal tersebut menunjukkan bahwa uji reabilitas variabel Y (kualitas pendidikan) dinyatakan reabel karna nilai *cronbach alpha (a)* lebih dari 0,6.

E. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari tanggal 6 April 2021 s/d 6 Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi desain concurrent triangulation (Metode campuran kuantitatif dan kualitatif secara seimbang) dimana hasil penelitian kualitatif memperjelas hasil penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi pada Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan kualitas pendidikan.

1. Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di

SMA Negeri 7 Pinrang

Kebijakan zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah, dimana sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase minimal 50% dari total jumlah yang diterima. Pada tahun ajaran 2020/2021 kebijakan zonasi di atur pada Peraturan menteri pendidikan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Adapun jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi dari tahun ajaran 2018/2019 sampai tahun ajaran 2020/2021 di SMA Negeri 7 Pinrang sebagai berikut :

Tabel 4.10

Jumlah Peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi

Tahun ajaran 2018/2019 sampai 2020/2021

Tahun Ajaran	Jumlah Peserta Didik
2018/2019	223
2019/2020	201
2020/2021	182

Sumber : Data Sekunder, SMA Negeri 7 Pinrang, 2021

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah tujuan kebijakan zonasi menurut (Suminar,2019) yaitu untuk pemerataan akses layanan

pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, dan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi.

a. Pemerataan akses pendidikan

Pemerataan akses pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar seluruh masyarakat mudah mengakses layanan pendidikan. Kejakan zonasi pada PPDB memudahkan anak usia sekolah diterima di sebuah lembaga pendidikan. Hal tersebut di sebabkan karena PPDB jalur zonasi mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisi terdekat dengan zona sekolah, dan tidak menerapkan sistem penerimaan berdasarkan kemampuan akademik ataupun status sosial ekonomi peserta didik sehingga semua anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan dengan mudah.

Pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu indikator dari variabel kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Maka untuk mengetahuinya dapat kita lihat dari hasil pengelolaan data dari 65 orang responden serta hasil wawancaranya.

Tabel 4.11 : Kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	17	26,2	85
Setuju	44	67,7	176
Kurang Setuju	4	6,1	12
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	273

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas, maka tanggapan tertinggi responden berada pada kategori setuju yaitu sebanyak 44 responden dengan persentase 67,7%, pada kategori sangat setuju sebanyak 17 peserta didik dengan persentase 26,2%, kemudian pada kategori kurang setuju terdapat 4 responden dengan persentase 6,1%, sedangkan kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden memilih setuju bahwa kebijakan zonasi menguntungkan calon peserta didik.

Kemudian diperjelas oleh informan MAA selaku ketua panitia PPDB dengan mengatakan bahwa:

“...mengenai menguntungkan atau tidaknya, itu dikembalikan pada perspektif masing-masing calon peserta didik, bagi calon peserta didik yang jauh dari zona sekolah, jalur zonasi ini akan merugikan mereka karena mereka tidak akan diterima disekolah yang mereka inginkan sebab rumahnya tidak masuk dalam zona yang ditentukan sekolah, tapi bagi calon peserta didik yang zonanya dekat dengan sekolah, jalur ini akan sangat menguntungkan, karena jalur zonasi ini di prioritaskan untuk calon peserta didik yang berada pada zona sekolah tersebut walaupun nilai UN mereka rendah...”
(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain yaitu FTR selaku sekretaris panitia PPDB yang mengatakan bahwa :

“...jalur zonasi ini sangat menguntungkan terutama peserta didik yang bertempat tinggal di kawasan sekolah, karena jarak rumahnya yang dekat dengan sekolah membuat mereka lebih menghemat waktu serta biaya transportasi apabila ada keperluan di sekolah,...” (hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Berdasarkan tanggapan responden dan diperkuat dengan hasil wawancara beberapa informan maka di simpulkan bahwa kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik, Adapun keuntungannya adalah

memudahkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan di sekolah sekitar, hal tersebut disebabkan karena jalur zonasi menerima setiap calon peserta didik yang bertempat tinggal di zona sekolah. Berarti tidak akan ada lagi anak yang berusia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan. Keuntungan lain dari adanya kebijakan ini adalah menghemat waktu dan biaya transportasi peserta didik.

Tabel 4.12 : Kebijakan zonasi memudahkan calon peserta didik diterima di sekolah

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	23	35,4	115
Setuju	42	64,6	168
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	283

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas tanggapan tertinggi dari responden adalah kategori setuju sebanyak 42 responden atau 64,6%, kemudian kategori sangat setuju sebanyak 23 peserta didik atau 35,4%, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Hal ini membuktikan bahwa Jalur zonasi memudahkan peserta didik diterima di sekolah. Mengenai hal tersebut, disampaikan juga oleh informan MAA selaku ketua panitia PPDB, beliau mengatakan bahwa:

“...Jalur zonasi dilihat dari jarak rumah dengan sekolah sebanyak 50% daya tampung yang disediakan. Pada proses pendaftaran calon peserta didik harus memilih 3 sekolah yang mereka mau, maka apabila sekolah pertama tidak diterima, maka

akan dilempar ke sekolah pilihan selanjutnya..” (*hasil wawancara tanggal 03 mei 2021*)

Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain yaitu

FTR sebagai sekretaris panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...jalur zonasi sangat memudahkan calon siswa/siswi didik diterima sekolah...” (*hasil wawancara tanggal 03 mei 2021*)

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara di atas maka

dapat disimpulkan bahwa, jalur zonasi memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan, hal tersebut disebabkan karena pada proses pendaftaran jalur zonasi, calon peserta didik diwajibkan untuk memilih 3 sekolah yang mereka inginkan, sehingga apabila pada pilihan pertama, daya tampung sekolah sudah penuh ataupun jarak antara rumah dan sekolah sangat jauh maka akan di alihkan pada pilihan selanjutnya, sampai seterusnya. Sehingga tidak akan ada lagi generasi bangsa yang tidak mendapatkan layanan.

Tabel 4.13 : Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur nilai rapor atau nilai UN

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	17	26.2	85
Setuju	48	73,8	192
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	277

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 48 atau 73,8% responden memilih setuju, 17 atau 26,2% memilih sangat setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau jalur zonasi, tidak sama sekali mengukur tingkat prestasi peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...Jalur zonasi di PPDB ini sama sekali tidak membutuhkan nilai rapor peserta didik, yang dibutuhkan hanya kartu keluarga yang dibuat 6 bulan sebelum PPDB dilaksanakan...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku

sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“... yang dibutuhkan pada saat PPDB jalur zonasi informasi jarak rumah dengan sekolah, bukan lagi nilai rapor maupun prestasi...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan zonasi tidak mengukur nilai rapor maupun prestasi peserta didik melainkan jarak antara rumah dengan sekolah, yang diketahui melalui pengumpulan kartu keluarga pada saat proses pendaftaran. Oleh sebab tidak akan ada lagi kompetisi dalam mendapatkan atau memperoleh layanan pendidikan sehingga tercipta pemerataan akses layanan pendidikan.

Tabel 4.14 : Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur tingkat ekonomi peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	16	24,6%	80
Setuju	49	75,4%	196
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	276

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 49 atau 75,4% responden memilih setuju, 16 atau 24,6% memilih sangat setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan kategori setuju merupakan kategori yang paling banyak dipilih oleh responden yang artinya bahwa jalur zonasi pada PPDB tidak mengukur tingkat ekonomi peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...PPDB jalur zonasi sama sekali tidak mengukur dari tingkat ekonomi peserta didik...” *(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*
Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku

sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...tingkat ekonomi peserta didik sangat tidak ada pengaruhnya pada proses PPDB jalur zonasi...” *(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*.

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan zonasi tidak melihat tingkat ekonomi peserta didik. Hal tersebut disebabkan karna kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, semua anak yang berusia sekolah wajib memperoleh layanan pendidikan, baik dari golongan ekonomi bawah, sederhana maupun ekonomi atas.

Tabel 4.15 : Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah dengan sekolah

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	15	23%	75
Setuju	50	77%	200
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	275

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 55 atau 75% responden memilih setuju, 15 atau 23% memilih sangat setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi diterima berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...dalam jalur zonasi, yang menentukan diterimanya calon peserta didik adalah seberapa dekat jarak antara rumahnya dengan sekolah...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...pada jalur zonasi wilayah rumah calon peserta didik sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya calon peserta didik disekolah ini...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jarak rumah dengan sekolah menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di sekolah.

Dari beberapa uraian di atas berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 : Pemerataan Akses Pendidikan

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik	17	26,6	44	67,7	4	6,5	-	-	-	-	273
kebijakan zonasi memudahkan calon peserta didik mendapatkan layanan pendidikan	23	35,4	42	64,6	-	-	-	-	-	-	283
Dengan adanya kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur nilai rapor dan prestasi	17	26,2	48	73,8	-	-	-	-	-	-	277
Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur tingkat ekonomi peserta didik	16	24,6	49	75,4	-	-	-	-	-	-	276
Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah dengan sekolah	15	23	50	77	-	-	-	-	-	-	275
Total Skor											1.384
Rata – Rata											276,8

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai indikator pemerataan akses pendidikan dengan 5 item pertanyaan mencapai skor total sebanyak 1.384 dengan rata-rata 276,8.

Adapun Skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator pemerataan akses pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi} \times N \times \text{Jumlah item pertanyaan} \\ &= 5 \times 65 \times 5 \\ &= 1.625\end{aligned}$$

Berdasarkan dari pengumpulan data kuesioner, jumlah skor total yang diperoleh sebanyak 1.384, maka skor penilaian dari 65 responden terhadap indikator pemerataan akses pendidikan yaitu :

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.384}{1.625} \times 100\% = 85,17 \%$$

Maka hasil penilaian indikator pemerataan akses pendidikan ditetapkan 85,17%, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Suminar, 2019) tentang kebijakan zonasi pemerataan akses pendidikan, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden tentang indikator pemerataan pendidikan dengan perolehan sebesar 85,17% dan masuk dalam kategori sangat setuju, kemudian diperkuat dengan kesimpulan hasil wawancara beberapa informan bahwa sejak adanya kebijakan zonasi anak-anak berusia sekolah lebih mudah

mengakses layanan pendidikan, hal ini disebabkan karena dalam jalur zonasi tidak mengukur prestasi akademik, non akademik, maupun tingkat ekonomi peserta didik melainkan berdasarkan domisili. Dalam jalur zonasi para pendaftar diwajibkan memilih 3 sekolah, apabila dalam pilihan pertama jarak rumah dengan sekolah jauh maka akan di alihkan ke pilihan selanjutnya, dengan itu tidak ada lagi alasan seorang anak tidak mendapatkan layanan pendidikan.

b. Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit

Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar seluruh lembaga pendidikan mempunyai kualitas yang sama dalam melayani masyarakat. Dengan menghilangkan anggapan di tengah masyarakat mengenai sekolah favorit dan *non* favorit, maka setiap sekolah akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh input yang unggul dan menjangkan proses pendidikan yang menghasilkan output yang berkualitas.

Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit adalah salah satu indikator dari variabel kebijakan zonasi. Maka untuk mengetahuinya dapat kita lihat dari hasil pengelolaan data dari 65 responden serta hasil wawancara dari beberapa informan penelitian.

Tabel 4.17 : Kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	11	16,9%	55
Setuju	54	83,1%	216
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	271

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa tanggapan tertinggi dari 65 responden mengenai kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit berada pada kategori setuju, dengan perolehan dari 54 responden dengan persentase 83,1%, selanjutnya kategori sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 16,9%, serta untuk kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih

Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat di simpulkan bahwa bahwa kategori setuju berada pada kategori tertinggi, artinya kebanyakan responden setuju apabila kebijakan zonasi dapat menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit. Hal ini juga diperjelas dalam hasil wawancara oleh MAA selaku Ketua panitia PPDB SMA 7 Pinrang yang menjelaskan bahwa :

“...dengan adanya zonasi ini siswa siswa unggul tidak akan lagi berkumpul di satu sekolah, karena tidak akan ada lagi lebel sekolah favorit dan tidak favorit ...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...jalur zonasi menghilangkan label sekolah favorit karena zonasi ini memproitkan siswa yang rumahnya dengan sekolah, bukan lagi menurut kepintaran...” (hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi bisa menghilangkan predikat sekolah favorit dan *non* favorit, hal ini disebabkan karena dalam zonasi setiap sekolah akan memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima siswa unggul serta siswa yang tidak unggul sehingga tidak akan ada lagi yang membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya.

Tabel 4.18 : Kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	6	9,2%	30
Setuju	53	81,6%	212
Kurang Setuju	6	9,2%	18
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	260

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa tanggapan tertinggi dari 65 responden mengenai kebijakan zonasi meningkatkan kualitas pendidikan berada pada kategori setuju, dengan perolehan sebanyak 53 responden dengan persentase 81,6%, kemudian tertinggi kedua berada pada kategori sangat setuju dan kurang setuju masing-masing 6 responden dengan persentase 9,2%, sedangkan kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih.

Berdasarkan tanggapan responden, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Seperti yang dikatakan oleh FTR yang menyatakan bahwa:

“...2-3 tahun terakhir sarana dan prasara sekolah ini sangat meningkat mulai dari renovasi ruang kelas, fasilitas seni dan olahraga sampai pemberian buku pelajaran gratis untuk siswa...*(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*

Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain yaitu SNA sebagai wakil kepala sekolah SMA 7 Pinrang yang menyatakan bahwa :

“...sarana dan prasarana di sekolah ini sangat berkembang karena dalam jalur zonasi kouta siswa sudah ditentukan, jadi perkembangan sarana dan prasaranya mengikuti perkembangan jumlah siswa yang diterima contohnya seperti kursi dan meja siswa, komputer dan buku buku yang dipakai dalam proses pembelajaran...”*(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)*

Dalam sistem zonasi kouta calon peserta didik yang diterima sudah ditetapkan sejak awal PPDB, oleh sebab itu pihak sekolah sudah mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang perlu di tingkatkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Berdasarkan hasil wawancara dan tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Tabel 4.19 : Kebijakan zonasi meningkatkan profesionalisme guru

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	7	10,8%	35
Setuju	57	87,7%	228
Kurang Setuju	1	1,6%	3
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	266

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat dilihat bahwa sebanyak 57 atau 87,7% responden memilih setuju, 7 atau 10,8% memilih sangat setuju, 1 orang responden memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi meningkatkan professional guru. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan SNA selaku wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwa :

“...zonasi ini memaksa guru untuk lebih professional karena siswa siswa yang diterima bervariasi, mulai dari siswa yang sangat pintar sampai siswa yang berkemampuan dibawah standar nilai rapor, sehingga guru dipaksa lebih kreatif dan tetap professional agar bisa menghadapi siswa dari berbagai variasi yang berbeda...”*(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)*

Kemudian diperkuat oleh hasil wawancara dari FTR selaku sekretaris PPDB sekaligus guru mata pelajaran komputer yang mengatakan bahwa :

“...selama zonasi, kouta guru yang dibutuhkan selalu tercukupi karena sebelum proses PPDB berjalan jumlah rombel sudah ditentukan, jadi disekolah ini tidak pernah kekurangan tenaga pendidik. Masalah profesioannya sekolah selalu mengadakan pelatihan agar kemampuan guru terus meningkat...”*(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*.

Profesionalisme guru dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengatasi perbedaan karakteristik setiap peserta didik, dalam PPDB jalur zonasi sekolah menerima peserta didik dari berbagai jenis karakteristik, sehingga guru akan lebih kreatif selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dan tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi meningkatkan professional guru.

Tabel 4.20 : Kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	8	12,3%	40
Setuju	41	63,1%	164
Kurang Setuju	16	24,6%	48
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	252

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa tanggapan tertinggi dari 65 responden mengenai kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik berada pada kategori setuju, dengan perolehan 41 responden dengan persentase 63,1%, selanjutnya kategori tertinggi kedua berada pada kategori kurang setuju dengan perolehan 16 responden dengan persentase 24,6%, kemudian kategori setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 12,3%, sedangkan untuk kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Berarti zonasi belum sepenuhnya meningkatkan motivasi belajar karena kategori kurang setuju masih berada pada kategori kedua, dengan jumlah responden 16 orang.

Hal ini diperjelas oleh FTR selaku sekretaris PPDB sekaligus guru mata pelajaran yang menyatakan bahwa :

“...selama pandemic covid proses pembelajaran dilakukan secara virtual, jadi banyak siswa yang mengeluh karena proses pembelajaran saat ini membuat semangat belajar mereka menurun...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Kemudian diperjelas oleh SNA selaku wakil kepala sekolah yang menyatakan bahwa :

“...sebenarnya zonasi ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa karna sekolah yang dekat dengan rumah, akan mengurangi gangguan dari lingkungan luar, jadi siswa bisa lebih fokus terlebih lagi pengawasan dari orang tua namun dalam masa pandemi ini, semangat belajar siswa sedikit menurun karena proses pembelajaran dilakukan secara virtual...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara di atas maka di simpulkan bahwa jalur zonasi sepenuhnya belum meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini disebabkan karena sistem pembelajaran daring selama masa pandemi ini, mengharuskan siswa belajar di rumah.

Tabel 4.21 : Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	15	23,1%	75
Setuju	42	64,6%	168
Kurang Setuju	8	12,3%	24
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	267

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas tanggapan tertinggi dari responden adalah kategori setuju sebanyak 42 responden atau 64,6%, kemudian kategori sangat setuju sebanyak 15 peserta didik atau 23,1%, kemudian kategori kurang setuju sebanyak 8 responden atau 12,3%, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada yang memilih. Mengenai Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah juga dijelaskan oleh informan SNA selaku wakil kepala sekolah, yang mengatakan bahwa:

“...tujuan dari zonasi ini menghilangkan perbedaan antar sekolah, baik dari perbedaan kualitas siswa maupun prasarannya, dalam zonasi ini sekolah sekolah tidak lagi memilih siswa berdasarkan tingkat prestasinya saja namun berdasarkan jarak rumahnya, jadi tidak ada lagi yang membedakan sekolah satu dengan yang lainnya...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021).
Kemudian hasil wawancara dari FTH sebagai sekretaris PPDB, yang

menyatakan bahwa :

“...kalau dilihat dari kualitas siswa tentu tidak akan ada lagi perbedaan karena kebijakan zonasi ini siswa diterima berdasarkan jarak rumahnya jadi tidak bisa memilih sekolah semau merek...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).
Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan

dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi bisa menghilangkan perbedaan antar sekolah . hal ini disebabkan karena dalam zonasi setiap sekolah akan memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima siswa unggul serta siswa yang tidak unggul sehingga tidak akan ada lagi yang membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya.

Dari beberapa uraian di atas berdasarekan responden dan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22 : Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	
Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit											
Kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah faforit dan non faforit	11	16,9	54	83,1	-	-	-	-	-	-	271

Kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah	6	9,2	53	81,6	6	9,2	-	-	-	-	260
Kebijakan zonasi meningkatkan profesional guru	7	10,8	57	87,7	1	1,6	-	-	-	-	266
Kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik	8	12,3	41	63,1	16	24,6	-	-	-	-	252
Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah	15	23,1	42	64,6	8	12,3	-	-	-	-	267
Total Skor											1.316
Rata - Rata											263,2

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai indikator menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit dengan 5 item pertanyaan mencapai total skor sebanyak 1.316 dengan rata-rata 263,2. Adapun Skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator pemerataan akses layanan pendidikan adalah sebagai berikut :

Skor Maximum = Skor Tertinggi x N x Jumlah item pertanyaan

$$= 5 \times 65 \times 5$$

$$= 1.625$$

Berdasarkan dari hasil penelitian indikator menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit memperoleh jumlah skor hasil pengumpulan data kuesioner sebanyak 1.316 maka tanggapan dari 65 responden terhadap indikator pemerataan akses layanan pendidikan yaitu:

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.316}{1.625} \times 100\% = 81\%$$

Hasil penilaian terhadap indikator menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit yang ditetapkan sebesar 81%, hal ini secara kontinum dapat dibuat dalam kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Suminar, 2019) tentang kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden mengenai indikator menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit diperoleh sebesar 81% dan masuk dalam kategori sangat setuju, kemudian diperkuat dengan kesimpulan hasil wawancara beberapa informan bahwa kebijakan zonasi sudah menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit di tengah masyarakat.

Kebijakan zonasi dapat menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit di SMA Negeri 7 Pinrang juga dibuktikan dengan peningkatan jumlah siswa yang di terima dari sebelum adanya zonasi yaitu tahun ajaran 2017/2018 sampai tahun ajaran 2020/2021.

Tabel 4.23
Jumlah peserta didik yang diterima di SMA Negeri 7 Pinrang
Tahun ajaran 2017/2018 sampai 2020/2021

Tahun Ajaran	Jumlah peserta didik
2017/2018	180
2018/2019	252
2019/2020	252
2020/2021	252

Sumber : Data sekunder, SMA Negeri 7 Pinrang, 2021

Dalam tabel di atas menjelaskan bahwa sebelum adanya zonasi yaitu tahun ajaran 2017/2018 kouta siswa yang mendaftar di SMA Negeri 7 Pinrang hanya 180 peserta didik, setelah adanya zonasi kouta peserta didik bertambah dan di sesuaikan dengan jumlah daya tampung yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa semenjak adanya zonasi sekolah sekolah regular tidak lagi kekurangan kouta pendaftar.

c. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi

Tujuan dari kebijakan zonasi adalah menghilangkan praktek eksklusivitas dan diskriminasi pada proses penerimaan peserta didik baru, eksklusivitas dalam pendidikan merupakan pelayanan istimewa yang diperuntukkan bagi orang atau kelompok tertentu saja, sehingga praktek diskriminasi di sekolah akan terlihat jelas. Dengan adanya jalur zonasi layanan pendidikan akan merata, setiap anak bangsa yang berusia sekolah

akan memperoleh hak yang sama, tidak akan ada lagi perbedaan pelayanan antar masyarakat.

Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi adalah salah satu indikator dari variabel kebijakan zonasi dalam PPDB. Maka untuk mengetahuinya dapat kita lihat dari hasil pengelolaan data dari 65 responden serta hasil wawancara dari beberapa informan penelitian.

Tabel 4.24 : Kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan pendidikan

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	14	21,5%	70
Setuju	49	75,4%	196
Kurang Setuju	2	3,1%	6
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	272

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kategori sangat setuju sebanyak 14 orang atau 21,5%, kemudian kategori setuju sebanyak 49 orang atau 75,4%, sedangkan kategori kurang setuju 2 orang atau 3,1%, dan kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Hal ini membuktikan bahwa Jalur zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan pendidikan. Mengenai hal tersebut, disampaikan juga oleh informan MAA selaku ketua panitia PPDB, beliau mengatakan bahwa:

“...dengan adanya zonasi ini anak-anak yang mau mendaftar di sekolah akan mudah diterima, karena jalur ini tidak lagi berdasarkan nilai rapor atau ujian nasional SMP nya, melainkan

berdasarkan jarak jadi anak anak tidak perlu lagi khawatir tidak memperoleh pendidikan..."(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021). Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain

yaitu FTR sebagai sekretaris panitia PPDB mengatakan bahwa :

"...pada jalur zonasi ini, kouta siswa untuk setiap sekolah sudah ditentukan dan pada saat pendaftaran setiap anak diwajibkan memilih 3 sekolah yang mereka ingin masuki, apabila sekolah pilihan pertama koutanya sudah full, maka otomatis akan dilempar ke sekolah pilihan kedua jadi tidak akan ada lagi alasan setiap anak tidak mendapatkan pelayanan Pendidikan..."(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jalur zonasi memudahkan anak berusia sekolah memperoleh layanan pendidikan, karena hal tersebut merupakan tujuan dari kebijakan zonasi, kebijakan zonasi diperuntukkan agar masyarakat bisa mudah memperoleh layanan pendidikan, agar pemerataan pendidikan lebih meningkat.

Tabel 4.25 : PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	9	13,8%	45
Setuju	52	80%	208
Kurang Setuju	4	6,2	12
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	265

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 9 atau 13,8% responden memilih sangat setuju, 52 atau 80% memilih setuju, kemudian 4 atau 6,25 memilih kurang setuju, sedangkan

tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau jalur zonasi, berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...yang mengukur diterima atau tidaknya siswa pada jalur ini adalah jarak rumah siswa dan sekolah, jadi zonasi sama sekali tidak memerlukan nilai rapor atau prestasi siswa...” (hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...yang mengukur prestasi atau nilai rapor adalah jalur prestasi, kalau zonasi hanya membutuhkan alamat pada kartu keluarga...” (hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan maka dapat disimpulkan bahwa, PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik melainkan jarak antara rumah dengan sekolah, yang diketahui melalui pengumpulan kartu keluarga pada saat proses pendaftaran.

Tabel 4.26 : PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	9	13,8%	45
Setuju	54	83%	216
Kurang Setuju	2	3,2%	6
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	267

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 54 atau 83% responden memilih setuju, 9 atau 13,8% memilih sangat setuju, kemudian 2 atau 3,2% memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan kategori setuju merupakan kategori yang paling banyak dipilih oleh responden yang artinya bahwa PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...PPDB jalur zonasi sama sekali tidak mengukur dari tingkat ekonomi peserta didik...” *(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*
Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku

sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...tingkat ekonomi peserta didik sangat tidak ada pengaruhnya pada proses PPDB jalur zonasi...” *(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)*.

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan zonasi tidak melihat tingkat ekonomi peserta didik. Hal tersebut disebabkan karna kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, semua anak yang berusia sekolah wajib memperoleh layanan pendidikan, baik dari golongan ekonomi bawah, sederhana maupun ekonomi atas.

Tabel 4.27 : PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	9	13,8%	45
Setuju	56	86,2%	224
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	269

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 65 atau 86,2% responden memilih setuju, 9 atau 13,8% memilih sangat setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan kategori setuju merupakan kategori yang paling banyak dipilih oleh responden yang artinya bahwa PPDB jalur zonasi berjalan tanpa adanya pemberian hak eksklusif kepada individu tau kelompok. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...pendaftaran PPDB sekarang melalui system online jadi yang mengatur diterima atau tidaknya siswa berdasarkan berkas yang mereka kirim pada saat pendaftaran, jadi dalam jalur ini semua siswa sama kedudukannya, tidak ada perbedaan walaupun sistwa tersebut anak dari kepala sekolah atau guru, mereka akan tetap dilayani sesuai peraturan...” (*hasil wawancara tanggal 03 mei 2021*)
Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku

sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...pada jalur zonasi tidak akan ada hak eksklusif karena dalam jalur ini system yang mengatur, kalua jarak rumah mereka dengan sekolah jauh, maka sitem akan memilihkan sekolah pilihan selanjutnya.” (*hasil wawancara tanggal 03 mei 2021*).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok, Hal tersebut disebabkan karena jalur zonasi diperuntukkan agar setiap masyarakat diberikan pelayanan yang sama dari pemerintah.

Tabel 4.28 : PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	15	23,1%	75
Setuju	48	73,8%	192
Kurang Setuju	2	3,1%	6
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	273

Sumber : Data primer, kuesioner penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 48 atau 73,8% responden memilih setuju, 15 atau 23,1% memilih sangat setuju, kemudian 2 atau 3,1% memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPDB jalur zonasi berjalan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan MMA selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...di jalur zonasi diskriminasi pada siswa tidak akan bisa terjadi karena jalur ini pendaftaran PPDB melalui online...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan FTR selaku sekretaris PPDB yang menyatakan bahwa:

“...yang mengatur berjalannya PPDB adalah pemerintah daerah, pemda membuat sebuah webside resmi pendaftaran PPDB, sehingga pendaftaran akan berjalan tanpa diskriminasi...” (hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan zonasi berjalan tanpa adanya diskriminasi. Pada dasarnya semua anak bangsa memiliki hak yang sama, karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Dari beberapa uraian di atas berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.29 : Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan Pendidikan	14	21,5	49	75,4	2	3,2	-	-	-	-	272
PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik	9	13,8	52	80	4	6,2	-	-	-	-	265
PPDB jalur zonasi	9	13,8	54	83	2	3,2	-	-	-	-	267

berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik											
PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok	9	13,8	56	86,2			-	-	-	-	269
PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi	15	23,1	48	73,8	2	3,1	-	-	-	-	273
Total Skor											1.346
Rata - Rata											269,2

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi dengan 5 item pertanyaan mencapai total skor sebanyak 1.346 dengan total rata-rata 269,2. Adapun Skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator pemerataan akses layanan Pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi} \times N \times \text{Jumlah item pertanyaan} \\
 &= 5 \times 65 \times 5 \\
 &= 1.625
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian dari indikator menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi diperoleh skor total sebanyak 1.346 maka hasil penilaian dari 65 responden yaitu:

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.346}{1.625} \times 100\% = 82,8\%$$

Dari hasil penilaian indikator menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi 82,8% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi dengan hasil penilaian sebesar 82,8% dan termasuk dalam kategori sangat setuju.

Berdasarkan perolehan hasil kuesioner dan wawancara beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Suminar, 2019) tentang kebijakan zonasi menghilangkan hak eksklusivitas dan diskriminasi, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden diperoleh sebesar 85,17% berada pada kategori sangat setuju, kemudian diperkuat dengan hasil wawancara beberapa informan bahwa penerimaan peserta didik baru jalur zonasi menerima peserta didik berdasarkan zona rumah dengan sekolah, bukan berdasarkan nilai rapor, kemampuan

akademik siswa, ataupun tingkat ekonomi peserta didik melainkan berdasarkan zona wilayah.

Dengan adanya kebijakan zonasi menghilangkan pemberian hak eksklusivitas dan praktek diskriminasi terhadap siswa, Pada saat proses penerimaan peserta didik baru penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan yang sama kepada setiap calon peserta didik tanpa membedakan status sosial mereka. Dalam PPDB jalur zonasi yang mengukur diterimanya calon peserta didik ke dalam sebuah sekolah adalah jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

Tabel 4.30 : Tanggapan responden tentang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 7 Pinrang

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Pemerataan akses pendidikan											
kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik	17	26,2	44	67,7	4	6,1	-	-	-	-	273
kebijakan zonasi memudahkan calon peserta didik mendapatkan layanan pendidikan	23	35,4	42	64,6	-	-	-	-	-	-	283
Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah	17	26,2	48	73,8	-	-	-	-	-	-	277

tanpa mengukur nilai rapor dan prestasi												
Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur tingkat ekonomi peserta didik	16	24,6	49	75,4	-	-	-	-	-	-	-	276
Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah dengan sekolah	15	23	50	77	-	-	-	-	-	-	-	275
Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit												
Kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit	11	16,9	54	83,1	-	-	-	-	-	-	-	271
Kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah	6	9,2	53	81,6	6	9,2	-	-	-	-	-	260
Kebijakan zonasi meningkatkan profesional guru	7	10,8	57	87,7	1	1,6	-	-	-	-	-	266

Kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik	8	12,3	41	63,1	16	24,6	-	-	-	-	252
Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah	15	23,1	42	64,6	8	12,3	-	-	-	-	267
Menghilangkan Eksklusivitas dan diskriminasi											
Kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan pendidikan	14	21,5	49	75,4	2	3,1	-	-	-	-	272
PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik	9	13,8	52	80	4	6,2	-	-	-	-	265
PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik	9	13,8	54	83	2	3,2	-	-	-	-	267

PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok	9	13,8	65	86,2	-	-	-	-	-	-	269
PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi	15	23,1	48	73,8	2	3,1	-	-	-	-	273
Total Skor											4.046
Rata-Rata											269,7

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden tentang kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang memperoleh skor total 4.046 dengan rata-rata 269,7 dari 15 item pernyataan yang di dapatkan dari ke tiga indikator. Adapun skor tertinggi dari setiap item pernyataan diberikan skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberikan skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang (X) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi Item Pernyataan} \times N \times \text{Item Pernyataan} \\
 &= 5 \times 65 \times 15 \\
 &= 4.875
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang diperoleh skor total sebanyak 4.046. Maka hasil penilaian dari 65 orang responden

terhadap variabel kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang yaitu :

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{4.046}{4.875} \times 100\% = 83\%$$

Hasil penilaian dari 65 responden mengenai kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang di tetapkan sebesar 83%, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Suminar, 2019) tentang tujuan kebijakan zonasi yaitu untuk pemerataan akses pendidikan, untuk menghilangkan predikat sekolah favorit, dan untuk menghilangkan hak eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil penilaian dari 65 responden sebesar 83% yang masuk dalam kategori sangat setuju, yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah.

“...jumlah peserta didik tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 702 peserta didik, 441 perempuan dan 261 laki-laki... “ (*hasil wawancara tanggal 24 juni 2021*)

Berdasarkan tanggapan dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki peserta didik yang siap dalam proses.berdasarkan wawancara dari informan diketahui sebanyak 702 peserta didik yang ada di SMA Negeri 7 Pinrang.

Tabel 4.32 :Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	9	13,8	45
Setuju	56	86,2	224
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	269

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan tertinggi responden mengenai sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran adalah berada pada kategori setuju yaitu sebanyak 56 responden dengan persentase 86,2%, pada kategori sangat setuju sebanyak 9 dengan persentase 13,8%, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih..

Adapun hasil wawancara dari SNA selaku wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, beliau mengatakan bahwa:

“...sarana dan prasarana di sekolah ini setiap tahunnya meningkatkan terutama prasaranya karena disesuaikan dengan jumlah rombel yang dibuka pada saat penerimaan siswa baru(*hasil wawancara tanggal 04 mei 2021*)

Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain yaitu HH sebagai kepala bagian tata usaha mengatakan bahwa :

“...sekolah memiliki banyak bangunan, diantaranya ada yang masih sedang renovasi, mengenai prasarana di kelas, sekolah juga selalu memperbaharui apabila ada kerusakan“ (*hasil wawancara tanggal 24 juni 2021*)

Berdasarkan tanggapan dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran peserta didik di sekolah.

Tabel 4.33 : Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	7	10,8	35
Setuju	58	89,2	232
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	267

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan tertinggi responden mengenai sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran adalah berada pada kategori setuju yaitu sebanyak 58 responden dengan persentase 89,2%, pada kategori sangat setuju sebanyak 7 dengan persentase 10,8%, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih..

Adapun hasil wawancara dari SNA selaku wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, beliau mengatakan bahwa:

“...sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan baik PNS maupun non PNS (*hasil wawancara tanggal 04 mei 2021*)

Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara informan lain yaitu HH sebagai kepala bagian tata usaha mengatakan bahwa :

“...total pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini adalah 54 orang.” (*hasil wawancara tanggal 24 juni 2021*)

Berdasarkan tanggapan dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang akan berperan penting dalam proses pembelajaran.

Tabel 4.34 : Sekolah menjalankan kurikulum pembelajaran

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	19	29,2	95
Setuju	46	70,8	184
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	279

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan tertinggi responden mengenai sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran adalah berada pada kategori setuju yaitu sebanyak 46 responden dengan persentase 70,8%, pada kategori sangat setuju sebanyak 19 dengan persentase 29,2%, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih.

Adapun hasil wawancara dari SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa:

“...kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 atau K-13 (*hasil wawancara tanggal 04 mei 2021*)

Berdasarkan tanggapan dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang menggunakan kurikulum dalam proses pembelajaran, Adapun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 atau biasa disebut K-13.

Tabel 4.35 : Sekolah Memiliki visi dan misi

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	23	35,4	115
Setuju	42	64,6	168
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	283

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas, maka tanggapan tertinggi responden mengenai kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik adalah berada pada kategori setuju yaitu sebanyak 42 responden dengan persentase 64,6%, pada kategori sangat setuju sebanyak 23 peserta didik dengan persentase 35,4%, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat diketahui bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki visi dan misi, serta sasaran yang ingin dicapai

Hal tersebut akan diperjelas oleh informan SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa:

“...sekolah memiliki visi dan misi dan sangat berperan penting dalam setiap aktivitas kependidikan. (hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Berdasarkan tanggapan dan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki visi dan misi serta sasaran yang ingin di capai.

Dari beberapa uraian di atas berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.36 : Input

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Sekolah Memiliki peserta didik yang siap mengikuti proses pembelajaran	17	26,2	48	73,8	-	-	-	-	-	-	277
Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran	9	13,8	45	86,2	-	-	-	-	-	-	269
Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan	7	10,8	58	89,2	-	-	-	-	-	-	267
Sekolah menjalankan kurikulum pembelajaran	19	29,2	46	70,8	-	-	-	-	-	-	279
Sekolah Memiliki visi dan misi	23	35,4	42	64,6	-	-	-	-	-	-	283
Total Skor											1.375
Rata – Rata											275

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai input pendidikan dengan 5 item pertanyaan mencapai total skor sebanyak 1.375 dengan total rata-rata 275. Adapun Skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator t pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi} \times N \times \text{Jumlah item pertanyaan} \\ &= 5 \times 65 \times 5 \\ &= 1.625\end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian indikator pendidikan diperoleh dari jumlah skor hasil dalam pengumpulan data kuesioner dengan sebanyak 1.375 maka tanggapan dari 65 responden terhadap indikator yaitu:

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.375}{1.625} \times 100\% = 84,6\%$$

Dari hasil penilaian indikator input pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sebanyak 84,6% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Hasil penelitian dari 65 responden di atas menunjukkan bahwa input Pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang berada dalam kategori sangat setuju dengan nilai 84,6%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Hanifah dan Suhana, 2012) tentang pendidikan yang berkualitas

dapat dilihat dari kualitas inputnya, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden tentang indikator input pendidikan dengan perolehan sebesar 84,6% dan masuk dalam kategori sangat setuju, Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara beberapa informan yang dapat disimpulkan bahwa input dalam hal ini peserta didik, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik di SMA Negeri 7 Pinrang sudah berkualitas.

b. Proses

Proses pendidikan adalah suatu kegiatan mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, dan nilai-nilai kepada peserta didik dengan cara tertentu yang sistematis, baik structural formal, informal, maupun non formal. Kelancaran proses pendidikan diukur dari bagaimana peran input pendidikan. Proses pendidikan dikatakan lancar apabila pelaku pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Maka untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dapat dilihat melalui tanggapan responden sebanyak 65 orang melalui kuesioner dan hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan.

Tabel 4.37 : Proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	18	27,7	90
Setuju	46	70,8	184
Kurang Setuju	1	1,5	3
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	277

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 46 atau 70,8% responden memilih setuju, 18 atau 27,7% memilih sangat setuju, kemudian 1 atau 1,5% memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya satu responden yang memilih kurang setuju sedangkan kategori setuju sebanyak 46 responden, itu artinya proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Pinrang meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...mengenai proses pembelajaran, sekolah selalu mewajibkan guru-guru membuat suasana yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga motivasi belajar siswa selalu meningkat ...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku

kepala bagian Tata Usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...saat ini proses pembelajaran dilakukan melalui online, dengan menggunakan aplikasi zoom, bukan melalui aplikasi Whats App jadi sebisa mungkin kami para guru membuat suasana *room zoom* lebih hidup sehingga para siswa tida bosan...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Pinrang meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didiknya.

Tabel 4.38 : Pada saat proses pembelajaran guru menguasai materi pembelajaran

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	18	27,7	90
Setuju	43	66,2	172
Kurang Setuju	4	6,2	12
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	274

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden mengenai guru menguasai materi pembelajaran dapat dilihat bahwa sebanyak 43 atau 66,2% responden memilih setuju, 18 atau 27,7% memilih sangat setuju, kemudian hanya 4 atau 6,2% responden yang memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 7 Pinrang guru-guru menguasai materi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...tentu guru harus menguasai materi dulu sebelum melakukan pengajaran karena penguasaan materinya sangat menentukan jalannya proses pembelajaran...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...guru-guru disini sangat mengedepankan profesionalisme, jadi guru selalu mementingkan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik ...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang dimiliki guru di SMA 7 Pinrang mereka lebih menguasai materi pelajaran.

Tabel 4.39 : Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	10	15,4	50
Setuju	55	84,6	220
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	270

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas mengenai guru menguasai materi pembelajaran dapat dilihat bahwa sebanyak 55 atau 84,6% responden memilih setuju, 10 atau 15,4% memilih sangat setuju, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Maka dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 7 Pinrang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...selama pandemi ini, kegiatan mengajar dilakukan secara online jadi sarana sekolah tidak digunakan lagi, tapi buku-buku mata pelajaran tetap dibagikan...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...sekolah memiliki beberapa laboratorium, ruang kreasi untuk siswa dan beberana sarana lainnya...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.

Tabel 4.40 : Sekolah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	8	12,3	40
Setuju	57	87,7	228
Kurang Setuju	0	-	-
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	268

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas mengenai SMA Negeri 7 Pinrang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dapat dilihat bahwa sebanyak 57 atau 87,7% responden memilih setuju, 8 atau 12,3% memilih sangat setuju, sedangkan kategori kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...dalam proses pembelajaran kita selalu memanfaatkan teknologi, contohnya seperti pemanfaatan computer di Lab, dll...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku

kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...selama pandemi ini kita selalu menggunakan teknologi informasi setiap proses pembelajaran berlangsung...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.

Tabel 4.41 : Sekolah menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	16	24,6	80
Setuju	48	73,9	192
Kurang Setuju	1	1,5	3
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	275

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas mengenai SMA Negeri 7 Pinrang menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif dapat dilihat bahwa sebanyak 48 atau 73,9% responden memilih setuju, 16 atau 24,6% memilih sangat setuju, kemudian hanya 1 atau 1,5% responden yang memilih kurang setuju, sedangkan kategori tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada satupun responden yang memilih. Maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang menyediakan laboratorium,

fasilitas olahraga, dan ruang kreatif. Hal ini dijelaskan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...sekolah memiliki 3 Lab, ada lab fisika, kimia, dan lab computer, fasilitas olahraga ada lapangan volley,futsal,taqraw, dan basket, untuk ruang kreatifnya sementara renovasi..”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 7 Pinrang menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif.

Tabel 4.42 : Proses

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	
Proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik	18	27,7	46	70,8	1	1,5	-	-	-	-	277
Pada saat proses pembelajaran guru menguasai materi pembelajaran	18	27,7	43	66,2	4	6,2	-	-	-	-	274
SMA Negeri 7 Pinrang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran	10	15,4	55	84,6	-	-	-	-	-	-	270

SMA Negeri 7 Pinrang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran	8	12,3	57	228	-	-	-	-	-	-	268
SMA Negeri 7 Pinrang menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif	16	24,6	48	73,9	1	1,5	-	-	-	-	275
Total Skor											1.364
Rata - Rata											272,8

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai proses pendidikan dengan 5 item pertanyaan mencapai total skor sebanyak 1.364 dengan total rata-rata 272,8. Adapun Skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator proses pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi} \times N \times \text{Jumlah item pertanyaan} \\
 &= 5 \times 65 \times 5 \\
 &= 1.625
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian indikator proses pendidikan di peroleh dari jumlah skor hasil dalam pengumpulan data kuesioner dengan sebanyak 1.364 maka tanggapan dari 65 responden terhadap indikator yaitu:

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.364}{1.625} \times 100\% = 83,9\%$$

Dari hasil penilaian indikator proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sebanyak 83,9% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 7 Pinrang sebesar 83,9% yang menunjukkan bahwa proses pendidikan berada pada kategori sangat setuju.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Hanifah dan Suhana, 2012) tentang pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari kualitas prosesnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden tentang indikator input pendidikan dengan perolehan sebesar 83,9% dan masuk dalam kategori sangat setuju. Kemudian diperjelas juga dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 7 Pinrang, proses pendidikannya dilakukan dengan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa, guru mata pelajaran duntut untuk terus professional, disediakan sarana dan prasarana belajar, serta dimanfaatkannya teknologi informasi agar proses pendidikan berjalan dengan lancar.

Proses pendidikan berjalan dengan baik apabila input pendidikan melakukan perannya dengan baik, input yang dimaksud adalah peserta didik, guru, sarana dan prasarana pembelajaran serta bahan bahan pembelajaran lainnya. Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan output pendidikan yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara dan penilaian dari 65 responden maka dapat dikatakan bahwa proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dalam kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, menjadikan guru lebih profesional, adanya sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan, serta dimanfaatkannya teknologi dan informasi.

c. Output

Output pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan, output pendidikan yang berkualitas adalah harapan setiap lembaga pendidikan, output yang berkualitas dapat dihasilkan melalui pelaksanaan proses yang baik.

Output pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila peserta didik menghasilkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik, output pendidikan berkualitas juga bisa dilihat dari proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dapat membentuk karakter menjadi lebih baik, meningkatkan spiritual atau intelektual, serta mendorong peserta didik untuk lebih kreatif dan inovatif.

Untuk mengetahui bagaimana output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dapat dilihat melalui tanggapan responden sebanyak 65 orang melalui kuesioner dan hasil wawancara dengan orang yang bersangkutan.

Tabel 4.43 : Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	4	6,15	20
Setuju	47	72,3	188
Kurang Setuju	14	21,5	42
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	250

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 47 atau 72,3% responden memilih setuju, 14 atau 6,15% memilih sangat setuju, kemudian 14 atau 21,5% memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga disimpulkan bahwa di SMA Negeri 7 Pinrang kebanyakan peserta didik berprestasi dalam bidang akademik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...prestasi prestasi yang dihasilkan siswa dalam bidang akademik sudah banyak, baik ditingkat Kabupaten sampai tingkat provinsi...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku

kepala bagian Tata Usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...baru-baru ini sekolah memenangkan lomba cerdas cermat ...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang menghasilkan prestasi akademik peserta didik.

Tabel 4.44 : Peserta didik berprestasi dalam bidang *non* akademik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	5	7,7	25
Setuju	48	73,9	192
Kurang Setuju	12	18,5	36
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	253

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 48 atau 73,9 responden memilih setuju, 5 atau 7,7% memilih sangat setuju, kemudian 12 atau 18,5% memilih kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga disimpulkan bahwa di proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang juga menghasilkan berprestasi dalam bidang non akademik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...sekolah terus berusaha meningkatkan minat peserta didik di bidang non akademik seperti menyediakan fasilitas olahraga, ruang kreatif serta organisasi internal untuk peserta didik seperti sanggar seni...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku

kepala bagian Tata Usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...dalam bidang non akademik, sekolah pernah memperoleh penghargaan dalam lomba film pendek...”(hasil wawancara tanggal 03 mei 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang juga menghasilkan prestasi *non* akademik.

Tabel 4.45 : Proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	13	20	65
Setuju	52	80	208
Kurang Setuju	0	0	0
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	273

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 52 atau 80% responden memilih setuju, 13 atau 20% memilih sangat setuju, sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. itu artinya proses pembelajaran di proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...kami sebagai tenaga pendidik sebisa mungkin menciptakan suasana pembelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku

kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...suasana belajar yang menyenangkan membuat kreativitas siswa lebih meningkat...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Pinrang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.

Tabel 4.46 : proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	5	7,7	25
Setuju	59	90,8	236
Kurang Setuju	1	1,54	3
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	264

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 59 atau 90,8% responden memilih setuju, 5 atau 7,7% memilih sangat setuju, kemudian 1 atau 1,5 memilih kategori kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. itu artinya proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...dalam proses pembelajaran kami selalu mengiringinya dengan pembentukan karakter siswa, termasuk spiritualnya ...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...setiap mata pelajaran berlangsung guru selalu mengiringinya dengan pendidikan spiritual...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Pinrang meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik.

Tabel 4.47 : Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif peserta didik

Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)	Skor
Sangat Setuju	11	16,9	55
Setuju	53	81,5	212
Kurang Setuju	1	1,5	3
Tidak Setuju	0	-	-
Sangat tidak setuju	0	-	-
Total	65	100	270

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 53 atau 81,5% responden memilih setuju, 11 atau 16,9% memilih sangat setuju, kemudian 1 atau 1,5% memilih kategori kurang setuju sedangkan tidak ada satupun responden yang memilih kategori kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. itu artinya Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif saya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SNA selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa :

“...kreativitas peserta didik juga dihasilkan dari kegiatan kegiatan ekstrakurikuler sekolah ...”(hasil wawancara tanggal 04 mei 2021)

Kemudian diperkuat oleh wawancara dari informan HH selaku kepala bagian tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“...peserta didik diberi ruang untuk berinovasi salah satu contohnya berinovasi dalam hal pembuatan obat obatan alami bagi peserta didik jurusan MIPA...”(hasil wawancara tanggal 24 Juni 2021).

Berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif peserta didik.

Tabel 4.48 : Output

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik	4	6,2	47	72,3	14	21,5	-	-	-	-	250
Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik	2	7,7	48	73,9	12	18,5	-	-	-	-	253
Proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik	13	20	52	80	-	-	-	-	-	-	273
proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik	5	7,7	59	90,8	1	1,5	-	-	-	-	264
Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif peserta didik	11	16,9	53	81,5	1	1,5	-	-	-	-	270
Total Skor											1.310
Rata – Rata											262

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden mengenai output pendidikan dengan 5 item pertanyaan mencapai total skor sebanyak 1.364 dengan total rata-rata 272,8. Adapun skor tertinggi dari setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah diberi skor 1. Untuk skor maximum indikator output pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi} \times N \times \text{Jumlah item pertanyaan} \\ &= 5 \times 65 \times 5 \\ &= 1.625\end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian indikator output pendidikan diperoleh dari jumlah skor hasil dalam pengumpulan data kuesioner dengan sebanyak 1.310 maka tanggapan dari 65 responden terhadap indikator yaitu:

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{1.310}{1.625} \times 100\% = 80,1\%$$

Dari hasil penilaian indikator output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sebanyak 80,1% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dari 65 responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa output pendidikan SMA Negeri 7 Pinrang berada pada kategori sangat setujud dengan penilaian sebesar 80,1%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori

dari (Hanifah dan Suhana, 2012) tentang pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari outputnya, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari 65 responden tentang indikator output pendidikan dengan perolehan sebesar 84,6% dan masuk dalam kategori sangat setuju. Kemudian diperjelas juga dengan hasil wawancara beberapa informan yang dapat disimpulkan bahwa kualitasnya output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dihasilkan dari proses pendidikan yang berjalan dengan baik, sehingga prestasi, kreativitas serta inovasi peserta didik terus meningkat.

Output pendidikan akan berkualitas apabila proses pendidikan berjalan dengan baik, output yang dimaksud adalah meningkatnya prestasi, kreativitas, inovasi serta keterampilan peserta didik, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan output yang berkualitas.

Berdasarkan penilaian 65 responden dan hasil wawancara dari beberapa informan maka penulis menyimpulkan bahwa output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sangat berkualitas. Hal tersebut dihasilkan dari pelaksanaan proses pendidikan yang berjalan dengan baik dengan menghasilkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

Adapun beberapa prestasi yang dihasilkan SMA Negeri 7 Pinrang 3 tahun terakhir antara lain, sebagai berikut :

Tabel 4.49
Daftar prestasi SMA Negeri 7 Pinrang
Tahun 2018 sampai tahun 2021

No.	Prestasi	Tahun
1	Juara 1 Lomba festival film pendek tingkat Provinsi	2018
2	Juara 3 Karate festival pelajar tingkat Provinsi	2018
3	Paskibraka tingkat Provinsi	2018
4	Juara 1 Volli Ball Putri se-Kabupaten	2018
5	Juara 1 Volli Putra se-Kabupaten	2018
6	Juara 1 Lomba karya ilmiah BAWASDA	2019
7	Juara 1 Scout Competition se-Sulawesi selatan	2019
8	Juara Olimpiade Sains tingkat kabupaten	2019
9	Juara 1 Lomba film pendek BPNB Sulawesi Selatan	2019
10	Juara 3 Lomba video pendek pengawasan partisipatif Bawashu Kab.Pinrang	2020
11	Juara 1 Lomba film pendek tingkat Provinsi	2021
12	Best media sosial dalam pemilihan duta pelajar Kab. Pinrang	2021
13	Juara Intelegensia duta pelajar Kab. Pinrang	2021

Sumber : Data Sekunder, SMA Negeri 7 Pinrang

Tabel 4.50 : Tanggapan responden tentang kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang

Pertanyaan	Jawaban Responden										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Input											
Sekolah Memiliki peserta didik yang siap mengikuti proses pembelajaran	17	26,2	48	73,8	-	-	-	-	-	-	277
Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran	9	13,8	45	86,2	-	-	-	-	-	-	269
Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan	7	10,8	58	89,2	-	-	-	-	-	-	267
Sekolah menjalankan kurikulum pembelajaran	19	29,2	46	70,8	-	-	-	-	-	-	279
Sekolah Memiliki visi dan misi	23	35,4	42	64,6	-	-	-	-	-	-	283
Proses											
Proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik	18	27,7	46	70,8	1	1,5	-	-	-	-	277

Pada saat proses pembelajaran guru menguasai materi pembelajaran	18	27,7	43	66,2	4	6,2	-	-	-	-	274
SMA Negeri 7 Pinrang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran	10	15,4	55	84,6	-	-	-	-	-	-	270
SMA Negeri 7 Pinrang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran	8	12,3	57	228	-	-	-	-	-	-	268
SMA Negeri 7 Pinrang menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif	16	24,6	48	73,9	1	1,5	-	-	-	-	275
Ouput											
Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik	4	6,2	47	72,3	14	21,5	-	-	-	-	250
Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik	2	7,7	48	73	12	18,5	-	-	-	-	253

Proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik	13	20	52	80	-	-	-	-	-	-	273
proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual peserta didik	5	7,7	59	90,8	1	1,5	-	-	-	-	264
Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif peserta didik	11	16,9	53	81,5	1	1,5	-	-	-	-	270
Total Skor											4.049
Rata-Rata											269,9

Sumber : Data Primer, Kuesioner Penelitian, 2021

Pada tabel di atas, tanggapan responden tentang kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang pada tabel di atas memperoleh skor total 4.049 atau dengan skor rata-rata 269,9 dari 15 items pernyataan yang di dapatkan pada ke tiga indikator. Adapun skor tertinggi dari setiap item pernyataan diberikan skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberikan skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kualitas pendidikan (Y) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maximum} &= \text{Skor Tertinggi Item Pernyataan} \times N \times \text{Item Pernyataan} \\
 &= 5 \times 65 \times 15 \\
 &= 4.875
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang diperoleh dari jumlah skor hasil peroleham dalam pengumpulan data kuesioner

dengan sebanyak 4.046 Maka tanggapan dari 65 orang responden terhadap kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang yaitu :

$$\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maximum}} \times 100\% = \frac{4.049}{4.875} \times 100\% = 83,1\%$$

Dari hasil penilaian kebijakan zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang 83,1% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan teori dari (Hanifah dan Suhana, 2012) tentang kualitas pendidikan dapat dilihat dari kualitas input, proses, dan output pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil penilaian dari 65 responden sebesar 83,1% yang masuk dalam kategori sangat setuju, yang menunjukkan bahwa input, proses, dan output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sudah berkualitas.

3. Pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang

Untuk melihat hasil pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang pada 65 responden yang dilakukan dengan menggunakan analisis

regresi dengan bantuan *SPSS Versi 25*. Adapun analisis regresi dapat diperoleh seperti di bawah ini :

a. Hasil uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur variabel dependen terkait.

Tabel 4.51 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,634	5,158		3,225	,002
	Kebijakan zonasi	,734	,083	,745	8,873	,000

a. Dependent Variable: Kualitas pendidika

Untuk menentukan besar pengaruh variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel *coefficients* dimana nilai Constant (a) sebesar 16,634 sedangkan nilai kebijakan zonasi (koefisien regresi) sebesar 0,734. Sehingga rumus model persamaan regresi sederhana yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16,634 + 0,734X$$

Berdasarkan persamaan regresi sederhana dapat ditentukan bahwa nilai koefisien regresi (b) sebesar 16,634 yang menyatakan bahwa variabel independen atau Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau kualitas pendidikan (Y). Kemudian nilai koefisien regresi sebesar 0,734 yang

berarti bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang akan meningkat sebesar 0,734.

Berdasarkan hasil t hitung yaitu 16,634 atau signifikan (Sig) sebesar 0,002 lebih kecil dari $< 0,05$ berarti H_a diterima. Hal ini berarti H_a kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang.

Dari hasil hipotesis di atas yaitu pertama atau H_a diterima menjelaskan bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) memberikan pengaruh yang kuat terhadap kualitas pendidikan karena dengan melalui kebijakan zonasi pemerintah berupaya menciptakan kualitas pada setiap sekolah, dengan kebijakan zonasi setiap sekolah akan menjadi sekolah yang berkualitas dengan begitu dengan perbedaan kualitas antar sekolah akan menghilang, anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan *non* favorit akan dihilangkan.

b. Hasil Uji F

Uji F atau simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai probabilitas (sig).

Tabel 4.52 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	627,392	1	627,392	78,728	.000 ^b
	Residual	502,054	63	7,969		
	Total	1129,446	64			

a. Dependent Variable: Kualitas pendidikan

b. Predictors: (Constant), Kebijakan zonasi

Untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan dapat dianalisis menggunakan regresi sederhana. Hal ini dilakukan untuk menganalisis antara satu variabel independent kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu (X) terhadap variabel dependen yaitu kualitas pendidikan (Y) di SMA Negeri 7 Pinrang.

Untuk pengambilan keputusan regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan lebih kecil $< 0,05$, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis a (H_a) diterima.
- 2) Jika nilai signifikan lebih besar $> 0,05$, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis a (H_a) ditolak.

Dapat kita lihat pada tabel Anova di atas bahwa nilai F hitung = 78.728 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka variabel Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas pendidikan (Y) sehingga dapat

diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 di tolak karena nilai *Sig* lebih kecil dari 0,05.

c. Hasil Uji Koefisien determinan

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.53

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,745 ^a	,555	,548	2,823

a. Predictors: (Constant), Kebijakan zonasi

b. Dependent Variabel : Kualitas pendidikan

Berdasarkan analisis data di atas kita dapat memperoleh informasi mengenai besarnya kontribusi variabel X mempengaruhi variabel Y, pengaruh tersebut disimbolkan dengan R (regresi). Seperti pada tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai regresi atau pengaruh (R) sebesar 0,745 yang artinya 74,5%. Dari besar pengaruh variabel independen atau kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) (X) terhadap variabel dependen atau kualitas pendidikan (Y) yang juga diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (R^2/R Square) atau koefisien penentunya sebesar 0,555 artinya 55,5%. Pengaruh variabel independent atau kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) (X) terhadap kualitas pendidikan (Y) sebesar 55,5%.

Dari data tersebut berada pada tingkat sedang sesuai pada tabel 3.3 hal tersebut juga dibuktikan dengan kolom *Standard Error* yang menunjukkan angka sebesar 2,823 jika nilai semakin mendekati angka 0 maka semakin akurat data yang diperoleh.

Kemudian informan MMA sebagai Ketua panitia PPDB mengatakan bahwa :

“...dengan adanya kebijakan zonasi, predikat sekolah favorit dan non favorit mulai menghilang. Dulu sebelum adanya kebijakan zonasi, banyak sekolah yang kekurangan pendaftar pada saat proses penerimaan peserta didik baru, kebanyakan calon peserta didik mendaftar di sekolah-sekolah yang di anggap favorit sehingga sekolah sekolah yang bukan favorit kekurangan input siswa. Sekolah favorit menerima calon peserta didik berdasarkan tingkat prestasi atau nilai ujian yang tinggi sehingga hanya siswa-siswa unggul yang diterima maka dapat dikatakan bahwa siswa-siswa unggul, guru guru yang berkualitas dan sarana prasarana pendidikan yang bagus juga akan berkumpul pada sekolah sekolah favorit saja sedangkan sekolah sekolah yang tidak di anggap favorit pendidikannya tidak akan berkualitas. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan zonasi, perbedaan antar sekolah mulai menghilang, kualitas semua sekolah sama, mulai dari input, proses pembelajaran, sampai output yang dihasilkannya serta akses masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan lebih dipermudah dengan itu tidak akan ada lagi alasan anak usia sekolah tidak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas...” (hasil wawancara tanggal 20 Juli 2020).

Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang sudah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kerja sama antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas. Begitupun sebaliknya jika tidak terjalin kerja sama yang baik maka program ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Ada 44,5% yang

tidak berpengaruh hal ini disebabkan oleh faktor – fator seperti kebijakan atau program pemerintah di bidang pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kebijakan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 7 Pinrang berada pada kategori sangat setuju dengan total penilaian sebesar 83%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri 7 Pinrang sudah sesuai dengan tujuan kebijakan zonasi yaitu meratakan akses pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit, dan menghilangkan eksklusifitas dan diskriminasi di sekolah.
2. Kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang berada pada kategori sangat setuju dengan total penilaian sebesar 83,1%. Hal ini menunjukkan bahwa input, proses, dan output pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang sudah berkualitas.
3. Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik (PPDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dengan nilai koefisien penentunya sebesar 0,555 atau 55,5% sedangkan yang tidak berpengaruh sebesar 44,5% yang disebabkan oleh kebijakan atau program lain di bidang pendidikan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan zonasi, Dengan demikian, masyarakat akan menyadari tujuan baik dari sistem zonasi ini sehingga mereka tak perlu lagi bersaing untuk masuk ke sekolah tertentu yang dianggap favorit karena dengan sistem ini seluruh sekolah nantinya akan menjadi sekolah favorit.
2. Pemerintah perl Pemerintah perlu mendirikan sekolah-sekolah negeri baru di berbagai daerah dari hasil pemetaan zonasi saat in

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31, Penjelasan Umum
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *sistem Pendidikan nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 4301. Jakarta
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1).
- Arwildayanto, Suking, A. & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung : Cendekia Press
- Asri, M. F. (2019). *pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan di indonesia*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang *perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Masyarakat Kemendikbud. (2018). "Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas", https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr. di akses tanggal 10 Februari 2021.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & Dewi, D. S. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*.
- Muhiddin.2019."Sistem zonasi dan pendidikan inklusif" <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/29/opini-sistem-zonasi-dan-pendidikan-inklusif>, di akses pada tanggal 10 Februari 2021
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & Dewi, D. S. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*.
- Sahabatnews 2019, Pinrang Sebut Banyak Orang Tua Siswa Keluhkan PPDB Sistem Zonasi,2019.<https://www.sahabatnews.net/2020/07/pwi-pinrang-sebut-banyak-orang-tua.html>, di akses pada tanggal 10 Februari 2021
- Makassartribunnews.2019.ketua IGI Sulses Diskusi zonasi di pinrang.. <tribunnews.com/2019/06/28/ketua-igi-sulses-diskusi-di-pinrang>. di akses tanggal 14 Februari 2021
- Paramartha, W., Suwardani, N. P., & Suryaningsih, N. L. (2020). Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan peserta didik baru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 283–295.
- Wulandari, D. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Vii Di Smpn 1 Labuhan Ratu Lampung Timur*
- Mubarok, M. R. (n.d.). Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas Xi Sma Negeri 5 Kota
- Purba, S., Revida, E., Tamrin, A. F., Bachtiar, E., Purba, (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan*.books.google.com.
- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas, 2006, H. 12

- Syafaruddin.2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta. H.56
- Arif Rohman.2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h. 79.
- Riant Nugroho, 2008. *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo. H,37
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *sistem Pendidikan nasional. 8 Juli 2003*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 4301. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang *perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.
- Andawiah, S. (2021). *Analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif stakeholder: Studi kasus SMA Negeri 1 Situbondo*.
- Suminar, Adjeng Ratna.(2019).*Sistem zonasi upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia*. Jakarta : Majalah Berita Duta
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- PDSPK Kemendikbud. (2018). *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Kemendikbud RI.
- Syafitri, A. A. (2019). *Zoning System Dalam Pemerataan Pendidikan (Studi Implementasi Kebijakan Sekolah Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah*
- Rusman.(2009). *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Wali Pers, h. 555

- Alfiningsih, D. F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di SMK Satria Jakarta Barat (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah).
- Hanafiah dan Suhana. (2012). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Refrika Aditama.
- Uhar Suharsaputra.(2010.) *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 231
- Sri Minarti,(2011). *Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hal. 328
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sudarwan Danim.(2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksar
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

KUESIONER

**PENGARUH KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI
SMA NEGERI 7 PINRANG**

Informasi Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Apakah anda Peserta didik dari jalur zonasi : Iya Tidak

Berilah jawaban pada pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang telah tersedia.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju.

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Pemerataan akses pendidikan						
1	Kebijakan zonasi menguntungkan peserta didik					
2	Kebijakan zonasi memudahkan calon peserta didik diterima di sekolah					

3	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur nilai rapor atau nilai UN					
4	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah tanpa mengukur tingkat ekonomi peserta didik					
5	Dalam kebijakan zonasi, peserta didik diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah dengan sekolah					
Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit						
6	Kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan <i>non</i> favorit.					
7	Kebijakan zonasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah					
8	Kebijakan zonasi meningkatkan profesionalisme guru					
9	Kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik.					
10	Kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah.					
Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi						
11	Kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan Pendidikan .					
12	PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon					

	peserta didik.					
13	PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik.					
14	PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok.					
15	PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi.					
Input						
16	Sekolah memiliki peserta didik yang siap mengikuti proses pembelajaran.					
17	Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.					
18	Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan.					
19	Sekolah menjalankan kurikulum pembelajaran.					
20	Sekolah Memiliki visi dan misi					
Proses						
21	Proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik.					
22	Pada saat proses pembelajaran guru menguasai materi pembelajaran.					
23	Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang					

	mendukung proses pembelajaran.					
24	Sekolah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran					
25	Sekolah menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif.					
Output						
26	Saya berprestasi dalam bidang akademik.					
27	Saya berprestasi dalam bidang <i>non</i> akademik					
28	Proses pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya					
29	proses pendidikan meningkatkan spiritual dan intelektual saya					
30	Proses pendidikan mendorong kreativitas dan inovatif saya					

Lampiran 2**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama Mahasiswa : Hilaliah

Nomor Stanbuk : 105641106517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Pengaruh kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang

A. Indikator kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (Variabel X)

1. Pemerataan akses Pendidikan

- Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai jalur zonasi menguntungkan peserta didik ?
- Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai Jalur zonasi mempermudah calon peserta didik diterima di sekolah?
- Apakah jalur zonasi ini, tidak mengukur nilai UN atau prestasi calon peserta didik lagi ?
- Apakah penerimaan peserta didik baru jalur zonasi juga tidak melihat tingkat ekonomi calon peserta didik ?
- Apakah jalur zonasi menerima peserta didik berdasarkan jarak rumah dengan sekolah ?

2. Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit

- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi menghilangkan predikat sekolah favorit dan *non* favorit ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi meningkatkan sarana dan prasarana sekolah?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi meningkatkan profesionalisme guru ?

- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi meningkatkan motivasi belajar peserta didik ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi menghilangkan perbedaan kualitas antar sekolah ?

3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi

- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan zonasi memudahkan setiap anak berusia sekolah memperoleh layanan Pendidikan ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat latar belakang kemampuan akademik calon peserta didik ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai PPDB jalur zonasi berjalan tanpa melihat perbedaan status sosial dan ekonomi calon peserta didik ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai PPDB jalur zonasi berjalan tanpa memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok ?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai PPDB jalur zonasi berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi ?

B. Indikator Kualitas Pendidikan (Variabel Y)

1. Input

- Apakah sekolah memiliki peserta didik yang siap mengikuti proses pembelajaran ?
- Apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran ?
- Apakah sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan ?
- Apakah sekolah memiliki kurikulum pembelajaran ?
- Apakah sekolah memiliki visi dan misi ?

2. Proses

- Apakah proses pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik ?
- Apakah guru menguasai materi pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung ?
- Apakah sarana dan prasarana sekolah mendukung proses pembelajaran ?

- Apakah sekolah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran ?
- Sekolah menyediakan laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif ?

3. Output

- Apakah Sekolah memiliki peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik ?
- Sekolah memiliki peserta didik yang berprestasi dalam bidang non akademik ?
- Apakah pembelajaran meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik ?
- Apakah proses pembelajaran meningkatkan intelektual dan spiritual peserta didik ?
- Apakah proses pembelajaran mendorong peserta didik lebih kreatif dan inovatif ?

Lampiran 3

Hasil Kuesioner Variabel X

No	Nama	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X1 0	X1 1	X1 2	X1 3	X1 4	X1 5	Tota l
1	Muhammad Bilal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
2	Muhammad Ramadhan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
3	M. Alwab Hutama Saputra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	Ismal Ahmad Nasruddin	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
5	Sahir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
6	Rusnah	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
7	Nurhikmah H	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	66
8	Rachmad Hidayah	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	64
9	Nur Hikmah Ukkas	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	65
10	Zahra Tri Ramadhani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58
11	Veryanto	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	56
12	Muh. Ilham	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	62
13	Silfarahayu	5	5	5	4	5	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	68
14	Ayu Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
15	Nurlina Syafitri	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	65
16	Riska	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
17	Alfiah Amalia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
18	Ayu Anggroni	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	61
19	Muhammad Ilham	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
20	Siti Nur Faidah	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
21	Afdal Fathir	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
22	Muh. Jumadil Awal	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
23	Nurzam Sabila	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
24	Hermansyah	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
25	Asriani	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	55
26	Kurniatunnisa	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	61
27	Fathul Nisa Mukhlis	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	58
28	Nur Azura	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
29	Nurwanda Hamida	4	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	58
30	An Nur	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	57
31	Sri Herawati	5	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	63
32	Nurhikmah	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
33	Dwi Yulianti Amir	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
34	Nurul Asisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
35	Adifa Najla	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
36	Winda Puspita	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	68
37	Deviyanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59

38	Desy Dina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
39	Andi Ahmad Farid Junaidi	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	63
40	Firman B Arifin	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
41	Refliana Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
42	Innah Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
43	Nur Annisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
44	Riswan	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	72
45	Nurafni Hamka	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
46	Ulul Azmi Novianti	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
47	Nurbazisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
48	Amanda Fatma Bengawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
49	Nur Eni Wulandari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
50	Aprianti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
51	Filzah Fadhilah	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	63
52	Vani Agustina	4	5	5	4	5	3	4	4	4	3	4	3	4	5	5	62
53	Nurul Asisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	63
54	Najwa Taqwa	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	62
55	Nurul Mardatillah	5	4	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	62
56	Nucafni Hamka	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	58
57	Afiwah Rusli	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	70
58	Fitra Ramadani	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	69
59	A. Ahmad Farid	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	67
60	Desy Dina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
61	Sciñ Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
62	Nabila Al-munaawaz R	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	62
63	Nur Halisa	4	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	5	65
64	Arham	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
65	William Al Fitrah	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	68

35	Adila Najla	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	59
36	Winda Puspita	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
37	Deviyanti	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	60
38	Desy Dina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
39	Andi Ahmad Farid Junaidi	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
40	Firman B Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
41	Reffiana Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
42	Innah Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
43	Nur Annisa	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3	5	4	4	64
44	Riswan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	72
45	Nurafni Hamka	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	64
46	Uhlul Azmi Novianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
47	Nurhazisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
48	Amanda Fatma Bengawan	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
49	Nur Wulandari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
50	Aprianti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
51	Filzah Fadhilah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
52	Vani Agustina	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	5	4	66
53	Nurul Asisa	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	63
54	Najwa Taqwa	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	67
55	Nurul Mardatihah	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	3	5	4	4	67
56	Nueafni Hamka	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
57	Afiawah Rusli	4	5	4	5	5	3	3	4	5	5	3	3	4	3	3	59
58	Fitra Ramadani	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	4	4	4	65
59	A. Ahmad Farid	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	67
60	Desy Dina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
61	Seifi Ramadani	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
62	Nabila Al-munawwas B	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	61
63	Nur Halisa	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	67
64	Arham	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
65	William Al Fitrah	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	67

Total	Pearson	.565**	.671**	.651**	.574**	.598**	.519**	.592**	.650**	.729**	.660**	.734**	.616**	.652**	.608	.654**	1
at	Correlation																
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Total Pearson	.748	.688**	.714**	.750**	.697**	.718**	.723**	.768**	.648**	.660**	.476**	.510**	.712**	.506**	.635	1
Correlation																
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Lampiran 7

UJI REABILITAS VARIABEL X
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	111	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	111	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
.895	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	57.86	15.306	.540	.890
X2	57.80	15.197	.644	.886
X3	57.86	15.434	.631	.887
X4	57.81	15.355	.603	.887
X5	57.81	15.446	.575	.889
X6	58.05	15.389	.440	.896
X7	57.99	15.482	.561	.889
X8	57.95	15.615	.688	.886
X9	57.90	15.399	.722	.884
X10	57.91	14.774	.610	.887
X11	58.02	15.200	.542	.890
X12	58.06	15.551	.479	.893
X13	57.92	15.548	.606	.888
X14	57.95	16.197	.512	.891
X15	57.88	15.523	.562	.889

Lampiran 8

UJI REABILITAS VARIABEL Y
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	65	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
.904	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	58.03	15.062	.695	.893
Y2	58.15	15.757	.640	.896
Y3	58.18	15.872	.674	.896
Y4	58.00	14.969	.696	.893
Y5	57.94	15.059	.630	.896
Y6	58.03	14.999	.655	.895
Y7	58.08	14.635	.652	.896
Y8	58.14	15.434	.729	.893
Y9	58.17	15.955	.598	.898
Y10	58.06	15.309	.591	.898
Y11	58.45	15.876	.375	.907
Y12	58.40	15.744	.413	.905
Y13	58.09	15.398	.660	.895
Y14	58.23	16.462	.451	.902
Y15	58.14	15.652	.573	.898

Lampiran 9

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	.555	.548	2.823

a. Predictors: (Constant), Kebijakan zonasi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	627.392	1	627.392	78.728	.000 ^b
Residual	502.054	63	7.969		
Total	1129.446	64			

a. Dependent Variable: Kualitas pendidikan

b. Predictors: (Constant), Kebijakan zonasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16.634	5.158			3.225	.002
	Kebijakan zonasi	.734	.083	.745		8.873	.000

a. Dependent Variable: Kualitas pendidikan

LAMPIRAN 10

Pembagian Kuesioner

Lampiran 11

Wawancara

Bapak Muhammad Fitrah, S.Pd

Ibu Drs. Hj. Sitti Nur Aeni, M.Pd

Bapak Muh. Ali Anwar, S.Pd

Lampiran 12

Prestasi SMA Negeri 7 Pinrang

LAMPIRAN 13

SMA Negeri 7 Pinrang

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0090/A.3-II/I/1442/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Hilaliah

S t a m b u k : 10564 11165 17

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

“Pengaruh Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pinrang”

Konsultan I : Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

Konsultan II : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 16 Januari 2021

D e k a n,

Dr. Hj. Irvani Rizki, S.Sos, M.Si

NBM. 730727

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Nomor : 1487/05/C.4-VIII/III/40/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Sya'ban 1442 H
29 March 2021 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0223/FSP/A.1-VIII/II/1442/2021 tanggal 25 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HILALIAH**
No. Stambuk : **10564 1106517**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 April 2021 s/d 5 Juni 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 3 3 8 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13023/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1487/05/C.4-VIII/III/40/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HILALIAH
Nomor Pokok : 105641106517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 06 April s/d 06 Mei 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal: 06 April 2021

Dr. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Seiaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 06-04-2021

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMAN 7 PINRANG**

Alamat: Jln. Poros Pinrang Pare Km.8, Bua, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang.
Kode Pos: 91271, Email: sman7pinrang@gmail.com, Website: sman7pinrang.sch.id, NPSN:40314430

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No: 421.3 / 078 - UPT SMA.7/ PRG/ DISDIK

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT SMAN 7 Pinrang menerangkan bahwa :

N A M A : HILALIAH
N I M : 105641106517
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
NAMA LEMBAGA : UNISMUH MAKASSAR
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Benar telah melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang*" yang pelaksanaannya dari tanggal 06 April s/d 06 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Juni 2021
Kepala Sekolah,

Drs. IKHWAN MATU, M.Pd
NIP. 19671231 199602 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0198/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 16 Agustus 2021 M

D e k a n,

Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 730727

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan:
Nomor : 0198/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

**Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Rabu, 18 Agustus 2021, Jam : 08.30 - Selesai Wita**

NO	STAMBUK TIM : II	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11065 17	Hilailiah	IP	Pengaruh Kebijakan Zonasi dalam Pemerintahan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pirrang	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 2. Dr. Muryanti Mustari, s.l.p., M.Si	1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua) 2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
2	10564 02184 15	A. Dwi Guna	IP	Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sahabat Desa Baring Kecamatan Sigei, Kabupaten Pangkep	1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si 2. Nur Khaerah, S.Sos., M.AP	3. Dr. Nuryanti Mustari, s.l.p., M.Si 4. Hardianto Hawing, ST, MT
3	10564 11151 17	Alwi Layadi	IP	Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Desa Tanah Kareng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	
4	10564 11029 17	Mujadidatunisa	IP	Dampak Kebijakan Lingkungan Terhadap Kerusakan Alam (Studi Kasus Bencana Banjir dan Longsor yang Terjadi di Masamba Tahun 2020	1. Dr. Anif Muhiiddin, M.Si 2. Hardianto Hawing, ST, MT	

Makassar, 16 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Hj. Hiyati Malik S. Sos, M.Si
NBM : 730727

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, setelah :
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen pengajar.

MENINGGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Keputusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai pengajar ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
 - Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
 - Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan dalam surat keputusan ini, maka harus segera dikembalikan sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 25 Agustus 2021 M
D e k a n,

Dr. H. Irfani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 330727

- Tembusan :**
1. Dosen yang bersangkutan
 2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/III/43/2021
 Tanggal : 25 Agustus 2021

**Susunan Tim Penguji Ujian Tutup Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Kamis, 26 Agustus 2021, Jam : 08.30 - Selesai Wita**

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11065 17	Hilaliah	IP	Pengaruh Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pinrang	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 2. Dr. Nuryanrti Mustari, s.Ip., M.Si	1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua) 2. Dr. Nuryanrti Mustari, S.IP., M.Si 3. Hardianto Hawing, ST.,MA 4. Ahamad Harakan, S.IP, M.H.I
2	10564 02184 15	A. Dwi Guna	IP	Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sahabat Desa Baring Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep	1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si 2. Nur Khaerah, S.Sos., M.AP	
3	10564 11151 17	Alwi Layadi	IP	Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	
4	10564 11029 17	Mujadidatunisa	IP	Dampak Kebijakan Lingkungan Terhadap Kerusakan Alam (Studi Kasus Bencana Banjir dan Longsor yang Terjadi di Masamba Tahun 2020)	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 2. Hardianto Hawing, ST.,MT	

Makassar, 25 Agustus 2021
 Dekan,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
 NBM : 730727

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hilaliah
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	14%	15%
2	Bab 2	25%	25%
3	Bab 3	10%	15%
4	Bab 4	9%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102

RIWAYAT HIDUP

HILALIAH, dilahirkan di Kabupaten Pinrang di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu tepatnya pada hari Sabtu 8 April 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan H. Arsyad dan Hj. Sitti Hajar, SKM. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 77 Bottae pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP 1 Mattiro Bulu dan tamat pada tahun 2014 kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMKN 1 Pinrang dan selesai tahun 2017. Pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Setara Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terhadap Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang”.